



VOLUME XI / NO. 105 / JUNI 2016

MEDIAKEUANGAN

TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL

INFRASTRUKTUR UNTUK NEGERI

Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama Pemerintah. Selain dari APBN, aliran dana investasi menjadi pembiayaan yang dinanti. Penopang pertumbuhan di masa depan.



Daftar Isi



Foto Cover
Arfindo Briyan

5 DARI LAPANGAN BANTENG

6 EKSPOSUR

10 LINTAS PERISTIWA

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. **Pelindung:** Menteri Keuangan Bambang P. S. Brodjonegoro. **Pengarah:** Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. **Penanggung Jawab:** Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. **Pemimpin Umum:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Neneng Euis Fatimah. **Pemimpin Redaksi:** Moh. Firdaus Rumbia. **Redaktur Pelaksana:** Dianita Sulastuti. **Dewan Redaksi:** Rizwan Pribhakti, Rezha S. Amran, Hadi Siswanto, Titi Susanti, Budi Sulisty, Yeti Wulandari, Pilar Wiratoma, Purwo Widiarto, Dendi Amrin, Sri Moeji S., Arief Rahman Hakim, Diah Sarkorini, Adya Asmara Muda, Noer Anggraini, Ali Ridho, Agung Sudaryono, Etti Dyah Widiati. **Tim Redaksi:** Irma Kesuma Dewi, Iin Kurniati, Farida Rosadi, Pradany Hayyu, Dwinanda Ardhi, Bagus Wijaya, Eva Lisbeth, Danik Setyowati, Novita Asri, Amelia Safitri, Faisal Ismail, Krisna Pandu Pradana, Joko Triharyanto, Adik Tejo Waskito, Cahya Setiawan, Akbar Saputra, Arif Nur Rokhman, Panji Pradana Putra, Ferdian Jati Permana, Sugeng Wistriono, Muparrih, Shera Betania, Sulis Gigih Prayogo, Pandu Putra Wiratama, Nur Muhlisim, Fita Rahmat, Syahrul Ramadhan, Muhammad Fabhi Riendi, Hesti Sulistiowati. **Redaktur Foto:** Tino Adi Prabowo, Gathot Subroto, Fransiscus Edy Santoso, Eko Priharyanto, Andi Al Hakim, Hadi Surono, Muhammad Fath Kathin, Arif Setiyawan, Putra Lusumo Bekti, Adhi Kurniawan, Muchamad Ardani. **Desain Grafis dan Layout:** Dewi Rusmayanti, Wardah Adina, Arfindo Briyan Santoso, Victorianus M.I. Bimo. **Alamat Redaksi:** Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330. **E-mail:** mediakeuangan@kemenkeu.go.id.

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya.

LAPORAN UTAMA

- 13 Pertumbuhan Tinggi, Infrastruktur Jadi Kunci
- 16 Infografis
- 18 Hilangkan Gap Pembiayaan
- 21 Sebentar Lagi Sumsel Punya LRT
- 23 Pembangunan Infrastruktur Selalu Menjadi Prioritas

REPORTASE

- 25 Pemerintah Serahkan Tanggapan atas Konsep Hasil Pemeriksaan LKPP 2015
- 26 Sebagai Host, Indonesia Sukses Gelar Sidang Tahunan IDB ke-41

WAWANCARA

- 27 Penegakan Hak Asasi Manusia Melalui Pembangunan Ekonomi

POTRET KANTOR

- 30 Teknologi Informasi Kuat Wujudkan Sistem Penganggaran Kuat

FIGUR

- 32 Selalu Siap

EKONOMI TERKINI

- 36 Perbaiki Regulasi dan Iklim Investasi

KOLOM EKONOM

- 40 Masihkah Berharap Pada Tax Amnesty?

GENERASI EMAS

- 44 Kembali Ke Rumah untuk Membangun Daerah

OPINI

- 46 Kembali Ke Rumah untuk Membangun Daerah

REGULASI

- 48 Pemanfaatan BMN Dorong Pembangunan Infrastruktur

INSPIRASI

- 50 Meraih Puncak Mimpi di Nusantara

RENUNGAN

- 52 Memperoleh Lebih dengan yang Sedikit

FILM

- 53 Menikmati Aksi Superhero dan Mutan dalam X-Men: Apocalypse

KULINER

- 54 Bakso Boedjangan, Boekan Coema Boeat Jang Jomblo!

SELEBRITI

- 56 Lebih Dinamis dan Progresif

57 BUNG PISKAL

MEDIA KEUANGAN adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel dibidangnya.

MEDIA KEUANGAN saat ini dapat diunduh di Google play dan App store.



LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA

mitra sinergi untuk
membangun negeri

Menjadi penggerak
optimalisasi pengelolaan
aset negara yang profesional,
inovatif, dan kontributif
untuk kepentingan publik

Ditengah semangat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, **Lembaga Manajemen Aset Negara** hadir sebagai instrumen fiskal Kementerian Keuangan untuk menjadi salah satu solusi bagi optimalisasi aset negara

- Mewujudkan optimalisasi manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam menyediakan aset terbaik bagi pemangku kepentingan
- Mewujudkan produktivitas dan praktik yang sehat dalam pengelolaan aset negara
- Meningkatkan potensi penerimaan negara bukan pajak
- Mengatasi kebutuhan pendanaan lahan untuk program pembangunan infrastruktur oleh pemerintah



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Optimalkan Pembangunan Infrastruktur

Akhir-akhir ini Presiden Jokowi giat mempromosikan Indonesia dengan melakukan kunjungan ke berbagai Negara. Pada April lalu, selama lima hari Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke empat negara Eropa, yakni Jerman, Inggris, Belgia, dan Belanda. Presiden Jokowi pun berhasil membawa sejumlah kesepakatan bisnis dari lawatannya tersebut.

Tujuan pemerintah menarik investasi dari luar negeri tentunya untuk semua bidang, termasuk sektor riil baik manufaktur, jasa, maupun sektor pertanian atau pertambangan. Khusus untuk infrastruktur tentunya yang bisa ditawarkan kepada pihak swasta, hanya proyek infrastruktur yang mempunyai nilai komersial atau yang sifatnya bisa *cost-recovery*.

Pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), anggaran infrastruktur diutamakan untuk infrastruktur

dasar. Apabila dibutuhkan penyesuaian terhadap anggaran, maka belanja untuk infrastruktur harus diprioritaskan dan tidak dapat diganggu gugat. Dalam alokasinya, Kementerian Pekerjaan Umum, Perhubungan, Pertanian, dan ESDM mendapat alokasi yang besar.

Beban subsidi BBM berhasil dihapuskan, belanja infrastruktur naik cukup tinggi. Di antara tahun 2014 ke 2015 misalnya, realisasi belanja infrastruktur meningkat hampir 100 triliun rupiah. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk berfokus pada infrastruktur sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur.

Sumber pembiayaannya di dalam APBN sendiri selain yang berasal dari rupiah murni, juga berasal dari penerimaan dalam negeri, dari pinjaman, baik dari pinjaman luar maupun dalam negeri. Pinjaman luar negeri tentunya ada yang berasal dari lembaga multilateral, kerja sama bilateral, dan juga ada yang dalam bentuk surat berharga khususnya untuk pinjaman domestik.

Prioritas infrastruktur yaitu konektivitas. Pemerintah berusaha memperkuat infrastruktur yang memperkuat konektivitas Indonesia maupun dengan negara-negara di sekitar Indonesia. Transportasi, baik darat, laut, maupun udara, jalan, jembatan, pelabuhan laut, bandara, dan transportasi lainnya menjadi penting.

Selanjutnya infrastruktur yang menjadi prioritas adalah yang benar-benar memenuhi hajat hidup orang banyak. Kebutuhan dasar masyarakat secara keseluruhan harus mendapatkan perhatian khusus. Misalnya, listrik. Indonesia sudah sangat tertinggal, padahal listrik kebutuhan hidup masyarakat dan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia @KemenkeuRI

Anggaran infrastruktur dalam APBN 2016 sebesar Rp313,5 T, meningkat Rp23,2 T dibandingkan alokasi APBNP 2015. Dari jumlah kebutuhan tersebut, APBN hanya mampu membiayai infrastruktur sekitar 41,25%. Sementara, kemampuan BUMN/D untuk pembiayaan infrastruktur sebesar 22,23%. Maka peran sektor swasta diperlukan untuk mengisi gap sebesar 36,52%. Sampaikan optimisme kamu mengenai pembangunan infrastruktur di Indonesia di masa depan dengan tagar #OpiniAnda

Nana @AlifiaAna
Indonesia adalah negara besar dengan masyarakat yg besar juga. Kita mampu mjd bangsa besar dg infrastruktur yg kuat @KemenkeuRI #OpiniAnda

MazzBro! @maspuguh1
#OpiniAnda NKRI adalah negara kepulauan. Investasi besar infrastruktur adalah mutlak, agar Sabang Merauke maju ekonominya.

ekoadadisini @ekosumando
infrastruktur a/ long-term public saving, sangat penting mengingat kondisi interkoneksi regional di Indonesia skrg #opinianda

tweet



www.kemenkeu.go.id



Kementerian Keuangan RI



@KemenkeuRI



Kemenkeu RI



kemenkeu



Ujian di Stadion

Ribuan peserta ujian saringan masuk Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (15/5). Kampus kedinasan yang berlokasi di Bintaro, Tangerang Selatan itu memang masih menjadi magnet para pelajar lulusan SMA untuk melanjutkan pendidikan. Di seluruh Indonesia, pendaftar ujian masuk PKN STAN tahun ini mencapai 93.582 orang.

Foto
Muhammad Fath



Perjuangan Para Penambang Belerang

Foto
Tino Adi P.

Pesona Gunung Ijen di Banyuwangi tak perlu disangsikan lagi. Pemandangan kawah berwarna hijau toska dan fenomena blue fire (api biru) telah menarik kedatangan jutaan wisatawan. Namun, sesungguhnya ada juga perjuangan hidup yang dapat dijadikan pelajaran di sana. Setiap hari, ratusan penambang naik turun kawah membawa puluhan kilogram belerang di pundak. Medan terjal dan asap yang berbahaya untuk kesehatan mereka lalui tanpa keluhan. Semua dilakukan demi nafkah untuk keluarga.





16/05 Menkeu dan Presiden IDB Buka Pameran Sidang Tahunan IDB

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro dan Presiden Islamic Development Bank (IDB) Ahmad Mohamed Ali Al Madani membuka eksibisi dan pameran sebagai *side events* Sidang Tahunan IDB ke-41 di Jakarta Convention Center, Jakarta. Dalam sambutannya, Presiden IDB menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang besar atas sambutan Pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah. Apalagi, Indonesia merupakan salah satu pendiri dan juga pemegang saham IDB.



Lelang Barang Rampasan Kejaksaan Jakarta Timur oleh KPKNL Jakarta V

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V berhasil melaksanakan lelang barang rampasan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur berupa dua unit sepeda motor, satu unit mobil tangki dan satu unit mobil sedan. Dalam kata sambutannya sebelum pelaksanaan lelang, Dudi Mulyakusumah selaku Pejabat Penjual menyatakan bahwa lelang barang rampasan merupakan wujud penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur bekerjasama dengan KPKNL Jakarta V dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah *inkracht*.

18/05

Teks
DJKN

Foto
DJKN



20/05

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Peringati Harkitnas, Menkeu Tanamkan Prinsip *Continuous Improvement*

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan bahwa bekerja harus dilakukan secara cerdas demi mencapai tujuan. Menkeu menegaskan perlunya prinsip *continuous improvement* agar dapat mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan publik. Hal tersebut ia sampaikan saat memimpin upacara memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-108 di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta.



17/05 Bea Cukai Kualanamu Gagal Ekspor Ribuan Ekspor Kepiting

Teks
DJBC

Foto
DJBC

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Belawan musnahkan 42.058 botol minuman keras berbagai merek, jenis, dan ukuran yang dikemas dalam 3.676 karton. Kepala KPPBC Belawan Haryo Limanseto menjelaskan bahwa miras tersebut merupakan hasil penegahan Bea Cukai Belawan atas importasi ilegal yang melalui pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Miras yang dimusnahkan tersebut diimpor oleh PT. IPJ yang diberitahukan sebagai Biji Plastik dengan perkiraan nilai barang mencapai lebih dari Rp5 miliar.



25/04

Teks
DJP

Foto
DJP

Pengadilan Negeri Pontianak Vonis Terpidana Pajak

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Pontianak menjatuhkan vonis 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp377 Juta kepada YLT atas perkara tindak pidana perpajakan di Pengadilan Negeri Pontianak. YLT adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pontianak. Majelis Hakim Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (UU KUP) Pasal 39 ayat (1) huruf c junto pasal 43, yaitu sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN selama tahun pajak 2010.

10/11

Teks
DJBC

Foto
DJBC

Bea Cukai Kualanamu Gagal Ekspor Ribuan Kepiting

Petugas Bea Cukai Kualanamu bekerja sama dengan Balai Karantina Ikan (KIPM) Kelas I Medan I berhasil menggagalkan ekspor ilegal kepiting sebanyak 17 koli atau 1.906 ekor kepiting oleh CV. MADA dengan negara tujuan Taiwan dan Bangkok di Bandara Internasional Kualanamu. Kepiting tersebut dikemas dalam 17 boks dengan berat total 479 kg. Seluruh kepiting yang berhasil diamankan petugas diketahui dalam keadaan bertelur dengan sebagian besar ukurannya di bawah 200 gram.





09/05

Teks
DJKN

Foto
DJKN

PT TASPEN Percayakan DJKN Untuk Merevaluasi Asetnya

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan PT TASPEN (Persero) melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama. Perjanjian ini adalah tindak lanjut permohonan penilaian yang diajukan PT TASPEN (Persero) kepada DJKN untuk merevaluasi aktiva tetapnya. PT TASPEN (Persero) melakukan revaluasi aset untuk kepentingan perpajakan. Perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Direktur Penilaian DJKN Meirijal Nur, dan Direktur Keuangan PT TASPEN (Persero) Benedicta Maria Tri Lestari.



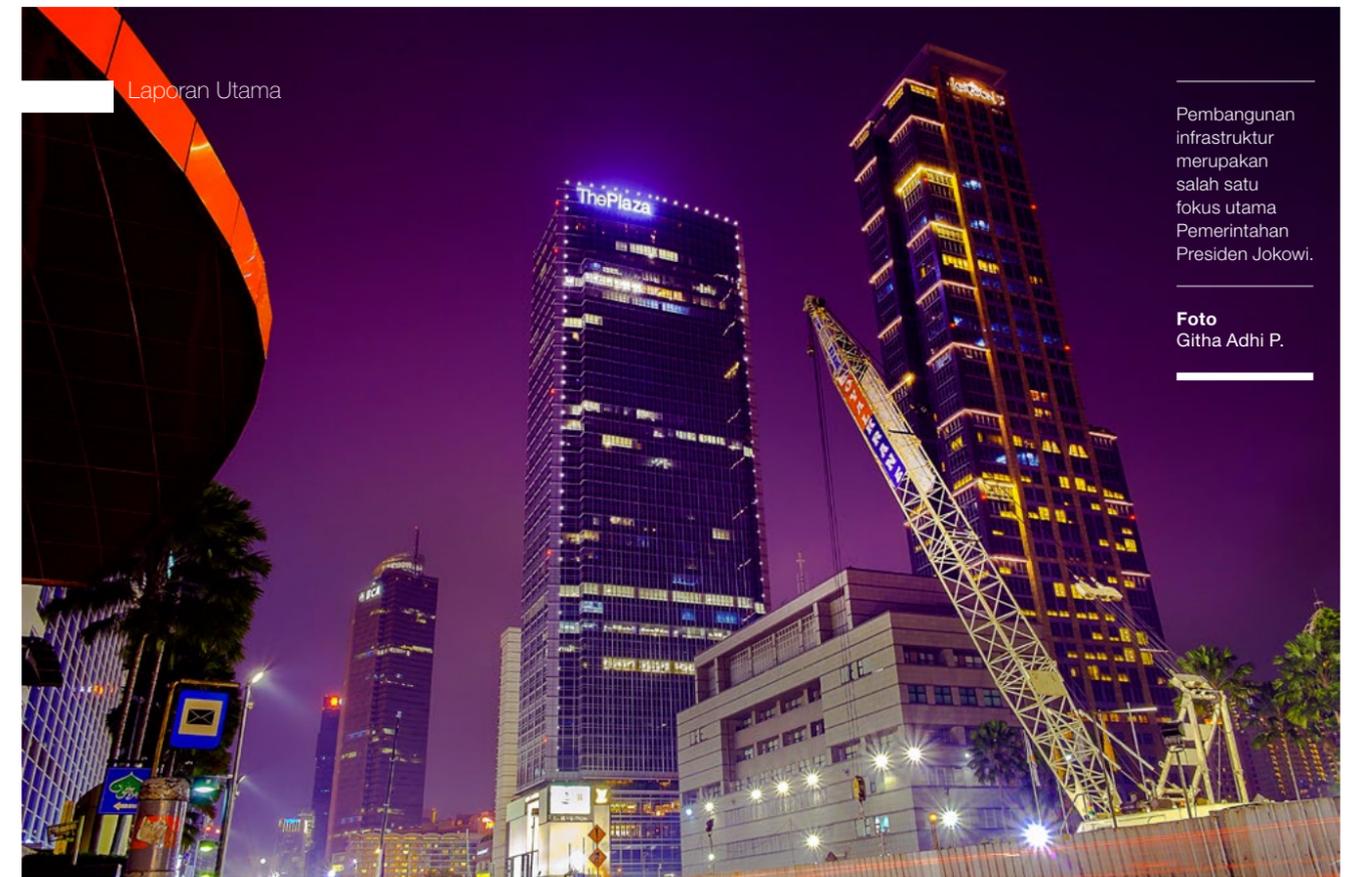
28/04

Teks
DJPPR

Foto
DJPPR

Peluncuran SBR002

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro secara resmi membuka masa penawaran Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR002 di Aula Mezzanine Gedung Juanda 1 Kementerian Keuangan. Masa penawaran SBR002 dimulai pada tanggal 28 April - 19 Mei 2016 dengan tingkat kupon minimal (*floor*) yang ditawarkan sebesar 7,50 persen dan tenor 2 tahun. Tema yang diusung kali ini adalah Investasi Aman, Pesisir Nyaman, terkait dengan pelestarian lingkungan hidup. Dengan membeli SBR002, maka masyarakat dapat ikut membantu berkontribusi dalam rehabilitasi Hutan Mangrove di Pesisir Pantai Indonesia.



Laporan Utama

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu fokus utama Pemerintahan Presiden Jokowi.

Foto
Githa Adhi P.

Pertumbuhan Tinggi, Infrastruktur Jadi Kunci

Setelah berhasil mengurangi belanja nonproduktif dalam bentuk subsidi BBM, Pemerintahan Presiden Jokowi kini memiliki alokasi anggaran yang lebih besar dan terarah untuk membiayai pembangunan. Melalui pengalihan anggaran subsidi, ketertinggalan berbagai infrastruktur dasar, dapat dikejar. Di samping menggunakan anggaran negara, pemerintah juga gigih mengupayakan berbagai sumber dan skema pembiayaan pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur.

Keinginan kuat menggenjot pembangunan dapat dilihat dari upaya Presiden Jokowi mempromosikan Indonesia sebagai negeri tujuan investasi dalam kunjungannya ke berbagai negara. Usai melakukan lawatan ke sejumlah negara di Eropa pada April lalu,

Presiden bertolak ke Korea Selatan (Korsel) dan Rusia sejak Minggu (15/5).

Tiba di Jakarta pada Sabtu (21/5), Presiden Jokowi dan beberapa pejabat negara yang mendampinginya, yaitu Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, serta Kepala Staf Presiden Teten Masduki membawa kabar baik. Dilansir dari laman setkab.go.id, Menlu mengungkapkan bahwa dari perjalanan di Korsel, tampak antusiasme yang sangat tinggi

dari para pengusaha di sana untuk berinvestasi. Misalnya, tercermin dalam bisnis forum yang dihadiri oleh lebih dari 500 pengusaha dan telah menghasilkan *deal* bisnis sebesar 18 miliar dolar AS.

Sementara di Rusia, "Khusus mengenai masalah investasi, salah satu komitmen di bidang investasi adalah pembangunan kilang minyak senilai 13 miliar dolar AS. Dan setelah pertemuan bilateral dengan Presiden Putin, ditandatangani lima kesepakatan kerja sama, yaitu di bidang pertahanan, IUU Fishing, arsip nasional, kebudayaan, dan arsip kementerian luar negeri," ujar

Menlu.

Bernadette Rabbiani, Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sriwijaya menyambut baik hasil positif di bidang investasi dari kunjungan Presiden Jokowi ke beberapa negara. Menurut Bernadette, hasil yang dicapai menunjukkan bahwa pemimpin Indonesia mempunyai komitmen dan merupakan seseorang yang mampu. “Presiden bisa mendengar dan memutuskan langsung tawaran atau dengan kata lain memperpendek birokrasi. Kehadiran para menteri dapat turut mempercepat eksekusi komitmen-komitmen yang didapatkan dari kunjungan itu,” kata Bernadette.

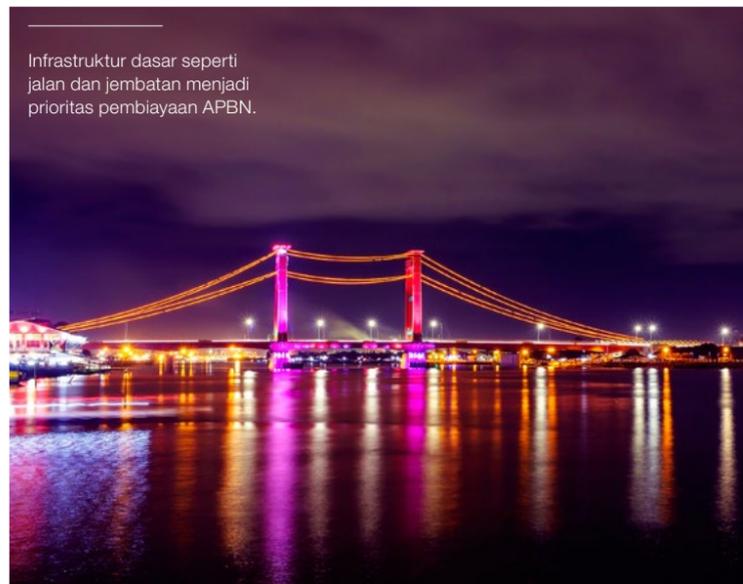
Efektivitas kunjungan Presiden Jokowi, lanjut Bernadette, sangat tergantung pada tindak lanjut di tataran implementasi oleh para menteri teknis terkait. “Misalnya komitmen yang sudah ditandatangani harus dipantau realisasinya dan jika belum direalisasikan, harus dicari tahu apa penyebab dan hambatannya,” ujar dia.

Menurut Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Hera Susanti, lawatan Presiden Jokowi menunjukkan komitmen pemerintah dalam upaya peningkatan investasi. “Termasuk menunjukkan komitmen untuk menyediakan berbagai fasilitas, baik fisik maupun nonfisik untuk mendukung Investasi domestik dan luar negeri melalui *foreign direct investment*,” kata Hera. Yang menjadi catatannya, efektivitas kunjungan Presiden perlu ditindaklanjuti dengan kesiapan sumber daya manusia dan sikap masyarakat dalam menyambut investasi.

Ditemui di kantornya pada Jumat (13/5), Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan kebutuhan investasi sebagai pembiayaan pembangunan infrastruktur memang tak bisa dihindari. Lebih lanjut, Menkeu menyampaikan bahwa masuknya investasi dari luar negeri bergantung dari kesiapan proyek-proyek yang ada. “Ketika masuk ke Indonesia, investor membutuhkan kepastian. Bukan hanya kepastian hukum, melainkan juga bisnis,” kata Menkeu. Kepastian bisnis antara lain terkait kelengkapan *feasibility study*, pembebasan lahan, dan perizinan.

Anggaran diprioritaskan

Meskipun alokasinya meningkat, anggaran infrastruktur tetap tak bisa mencukupi seluruh kebutuhan pembangunan. Menurut Menkeu, yang menjadi prioritas pembiayaan dari APBN adalah infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan. Selain itu, belanja modal lain yang diprioritaskan adalah yang memperkuat konektivitas dan memenuhi hajat hidup orang banyak. Yang menjadi perhatian khusus



Infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan menjadi prioritas pembiayaan APBN.

berikutnya adalah infrastruktur kelistrikan. “Soal listrik kita memang sudah sangat tertinggal. Padahal listrik adalah kebutuhan hidup masyarakat dan itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Menkeu.

Dalam waktu dekat, pemerintah dan DPR akan segera membahas postur APBN Perubahan (APBN-P) 2016. Pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pemotongan belanja yang kurang produktif. Namun, Menkeu menekankan bahwa jika ada penyesuaian terhadap anggaran APBN-P, belanja untuk infrastruktur tidak akan diganggu gugat.

Saat ini, pemerintah menjalankan beberapa skema pembiayaan infrastruktur. Yang pertama adalah pembiayaan bersumber dari APBN dan APBD. Skema kedua adalah menggunakan dana Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sedangkan yang ketiga adalah dari sektor swasta, baik swasta murni tanpa dukungan pemerintah maupun dalam bentuk kerja sama antara pemerintah dengan pihak swasta. “Kami ingin mendorong agar infrastruktur yang

mempunyai nilai komersial agar dapat dibangun oleh BUMN atau menggunakan skema partisipasi dari sektor swasta,” kata Menkeu.

Peran aktif kepala daerah

Pemerintah bukan hanya sekadar menggenjot pembangunan, melainkan juga memastikan pemerataannya. Program Nawa Cita dari Presiden Jokowi salah satunya memuat keinginan pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Pemerintah terus berupaya memeratakan pembangunan antarwilayah.

Untuk mewujudkan hal ini, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan. Dalam diskusi bertajuk “Membangun Indonesia dari Daerah” yang digelar Badan Kebijakan Fiskal bekerja sama dengan Komunitas Mezzanine Club di Jakarta sebagai salah satu rangkaian *side events* Sidang Tahunan Islamic Development Bank, Senin (16/5), topik ini menjadi salah satu bahasan menarik. Bupati

Bantaeng Nurdin Abdullah dan Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak yang hadir sebagai pembicara juga memaparkan berbagai upaya mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah yang mereka pimpin.

Menurut Nurdin Abdullah, delapan tahun silam, Kabupaten Bantaeng adalah kabupaten terkecil di Provinsi Sulawesi Selatan, baik dari luas wilayahnya maupun jumlah penduduknya. Hal tersebut berdampak pada porsi alokasi dana transfer yang lebih sedikit dibanding daerah lain. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan langkah Nurdin dalam membangun daerahnya. Melalui sinergi apik dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, perlahan tapi pasti pembangunan terus tumbuh di sana.

Melihat profil Kabupaten Bantaeng yang senantiasa dilanda banjir saat musim Hujan dan mengalami kekeringan saat musim Kemarau, Nurdin membangun cekdam atau bendungan yang dapat mengatasi dua masalah tersebut sekaligus. Pembangunan infrastruktur untuk kepentingan publik terus digenjot. Kabupaten Bantaeng juga membangun rumah sakit megah dengan fasilitas lengkap. Untuk meningkatkan layanan kesehatan, pemerintah daerah menyediakan beberapa unit ambulans yang diawaki dokter dan perawat. Ambulans tersebut siaga 24 jam sehari dan dapat dipanggil melalui saluran telepon apabila ada warga yang membutuhkan.

“Ruang terbuka seperti objek wisata dan alun-alun pun tak luput dari sentuhan pembangunan. Dengan adanya fasilitas umum dan fasilitas sosial yang memadai, indeks kebahagiaan masyarakat Kabupaten Bantaeng terus meningkat,” ujar Nurdin.

Bantaeng kini tengah merintis kawasan industri. Hal ini merupakan tindak lanjut setelah berbagai program pembangunan infrastruktur dibangun di kabupaten yang sebelumnya merupakan daerah tertinggal. Ini akan membantu Bantaeng menjadi daerah hilir. Terkait pendanaan, Nurdin mengatakan, “Kami tidak berputus asa dengan hanya mengandalkan APBN.”

Sementara itu, Emil Elestianto Dardak, Bupati Trenggalek, meyakini bahwa infrastruktur merupakan prasyarat terwujudnya daya saing daerah. “Oleh karena itu, kami melakukan pembangunan trotoar dua meter, pembangunan dan perbaikan pasar, serta perbaikan kantor camat warisan Belanda. Itu mengubah wajah kota menjadi lebih humanis,” kata Emil.

Meski baru dilantik menjadi bupati pada 17 Februari 2016 lalu, sudah tampak perbaikan dan capaian nyata di Trenggalek di bawah kepemimpinan Emil. Salah satunya dengan rencana pembangunan jaringan *fiber optic* hingga ke ujung selatan pesisir Trenggalek untuk menunjang komunikasi dan pertukaran informasi di sana. Kabupaten Trenggalek saat ini juga megembangkan program 100 hari menuju Smart Regency. Program ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai aplikasi dan pengembangan IT.

Emil ingin mengubah perspektif yang menganggap Kabupaten Trenggalek berada di lokasi paling belakang dan tidak strategis. Dengan pembangunan berporos maritim yang tengah dijalankan pemerintah, Kabupaten Trenggalek justru berada di posisi terdepat yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Kabupaten ini memiliki bentang

alam yang strategis untuk dijadikan pelabuhan laut berkapasitas besar. Bersama beberapa kabupaten lain di sekitarnya, Kabupaten Trenggalek akan membangun koridor jalur selatan Pulau Jawa sebagai jalur transportasi dan distribusi yang dapat menggerakkan perekonomian. “Dalam membangun, kami harus menghindari perasaan inferior,” kata Emil.

Peran lembaga pembiayaan

Dalam diskusi yang sama, Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Emma Sri Martini menyambut baik keberadaan pemimpin-pemimpin daerah yang visioner seperti Bupati Bantaeng dan Bupati Trenggalek. Emma menuturkan bahwa lembaga pembiayaan yang dipimpinnnya membuka ruang kerja sama dengan daerah dalam membangun infrastruktur. Hingga saat ini, PT SMI sendiri telah berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur hingga 120 triliun rupiah. “Kami harapkan ke depan penambahan komitmen dan *outstanding* dana dari PT SMI bisa lebih eksponensial,” kata Emma.

Ke depan, PT SMI juga diharapkan dapat bertransformasi menjadi Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia. Dengan demikian, pembiayaan yang masuk dalam *coverage* bukan hanya untuk infrastruktur, melainkan juga untuk industri dan agrikultur. “Diharapkan transformasi itu bisa berproses tahun depan,” katanya lagi.

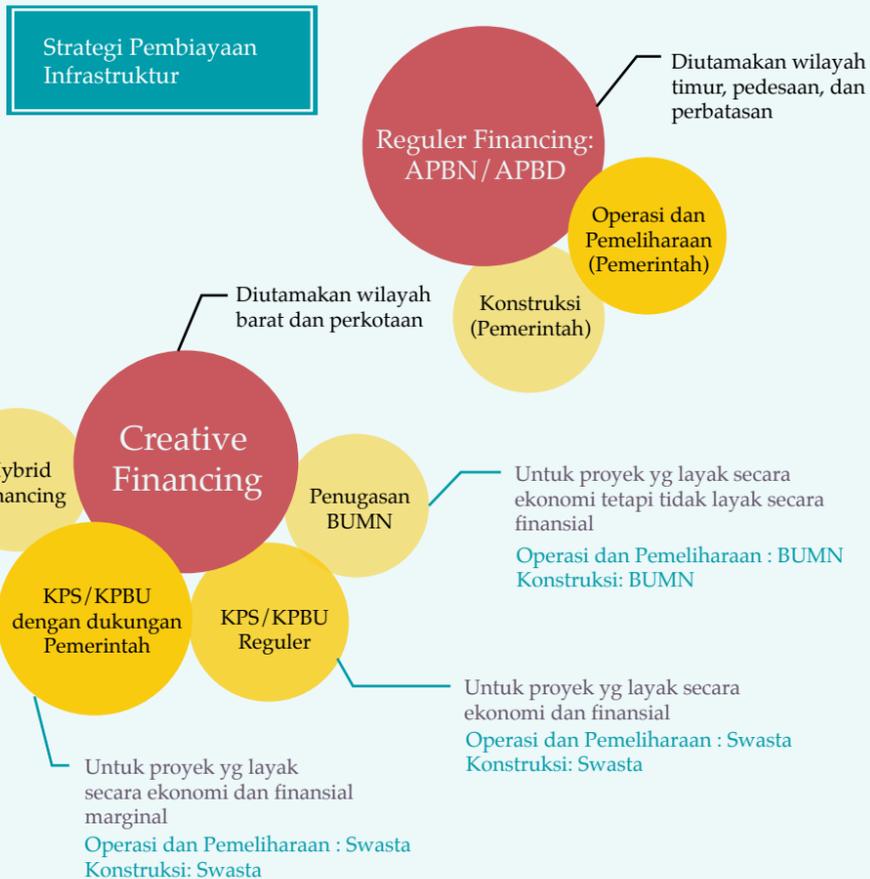
Dari Kampus FEB UI Depok, Hera mendukung keberadaan PT SMI sebagai katalisator pembangunan. Menurut Hera, kemampuan pembiayaan pemerintah dalam berbagai aspek pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur relatif terbatas. Peran lembaga pembiayaan seperti PT SMI sangat diperlukan. “Yang penting adalah bagaimana mengelola berbagai sumber dana yang ada, agar saling berkomplemen untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan,” ujar Hera.

Sementara dari Banjarmasin, Handry Imansyah, Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat mengatakan eksekusi proyek-proyek infrastruktur, terutama di daerah bisa di lebih cepat dilaksanakan dengan skema pembiayaan dari PT SMI. Berbeda dengan perbankan yang meminta jaminan untuk kredit infrastruktur, PT SMI tidak memerlukannya. Oleh karena itu, Handry berpendapat bahwa peran PT SMI dalam mengejar pembangunan infrastruktur sangat strategis.

—————
Teks Dwinanda Ardhi

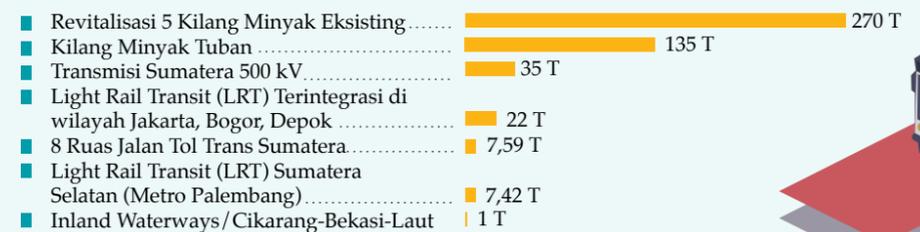
Strategi Pemerintah Bangun Infrastruktur

Dana terbatas tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk mundur dari komitmennya membangun infrastruktur. Sejumlah strategi dilakukan, utamanya dalam memperoleh sumber dana dalam membiayai pembangunan. Demi mendongkrak perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.



Skema Pembiayaan Beberapa Proyek Prioritas

Penugasan BUMN

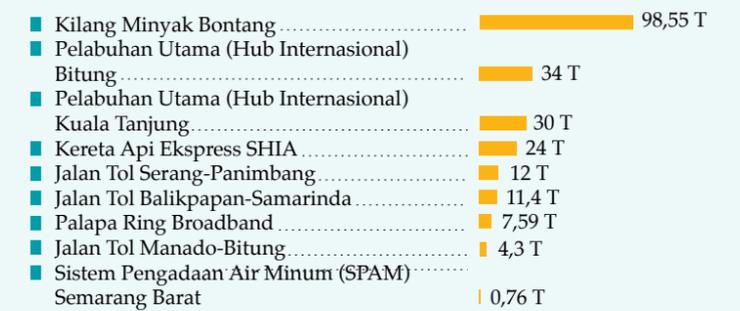


APBN dan APBD



Ket: dapat dilakukan dengan pinjaman luar negeri

KPBU



Ket: dapat dilakukan dengan dukungan pemerintah dalam bentuk VGF/ AP, maupun partial construction

Hilangkan Gap Pembiayaan

Kilang minyak.

Foto
Anas Nur
Huda



Dalam *Opening Ceremony* Sidang Tahunan Islamic Development Bank (IDB) ke-41, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa hal yang sangat penting adalah menggerakkan ekonomi bersama untuk kemakmuran rakyat. Wapres mengungkapkan bahwa salah satu kebijakan strategis yang diusung pemerintah untuk mewujudkannya ialah pembangunan infrastruktur.

“Sebagai negara yang memiliki penduduk lebih dari 250 juta jiwa, Indonesia telah mengambil sejumlah kebijakan strategis. Pertama, meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk mempermudah logistik (arus distribusi barang/jasa) antar daerah di Indonesia sebagai negara kepulauan. Kedua, memperbaiki sistem Keuangan. Ketiga, memperbaiki birokrasi dalam negeri. Terakhir, memperkuat kerja sama perdagangan,” ungkap Wapres di Jakarta Convention Center, Selasa (17/5) lalu.

Untuk mendukung pembangunan infrastruktur, poin utama yang dibutuhkan yakni dana dengan nominal tidak sedikit. Dalam APBN tahun 2016 tercatat, total kebutuhan anggaran infrastruktur mencapai Rp313,5 triliun. Anggaran infrastruktur ini diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu infrastruktur ekonomi sebesar Rp302,6 triliun, infrastruktur sosial sebesar Rp6,5 triliun, dan dukungan infrastruktur sebesar Rp4,4 triliun.

Kebutuhan pembiayaan infrastruktur dalam lima tahun seperti tercantum dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2015-2019 sekitar Rp4.796,2 triliun. Berdasarkan data tersebut, kemampuan pemerintah melakukan pembiayaan untuk infrastruktur melalui APBN dan APBD hanya sebesar 41,25 persen dari total kebutuhan. Sementara kemampuan BUMN/BUMD dalam pemenuhan pembiayaan sebesar 22,23 persen sehingga masih terdapat *gap* sebesar 36,52 persen.

Untuk memenuhi *gap* pembiayaan infrastruktur, ada tiga skema kebijakan/strategi pembiayaan yang digunakan pemerintah. Pertama, skema pembiayaan melalui APBN/APBD. Kedua, pembiayaan melalui penugasan kepada BUMN. Ketiga, pembiayaan melalui Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau *Public Private Partnership* (PPP).

Pemerintah juga memberikan fasilitas penjaminan kepada BUMN dari Lembaga Keuangan Internasional. Fasilitas ini digunakan untuk penyediaan infrastruktur dan perusahaan pembiayaan infrastruktur milik negara dari Lembaga Keuangan Internasional yang akan diteruskan kepada BUMN lainnya.

Pada skema pembiayaan melalui APBN/APBD,

pembiayaan digunakan untuk penyediaan infrastruktur layanan publik dasar seperti pemeliharaan jalan dan jembatan, saluran air dan irigasi, waduk, dan sebagainya. Pembiayaan ini bersumber dari utang dan non-utang. Untuk sumber pembiayaan melalui utang, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) melakukan penerbitan Surat Berharga Negara maupun melakukan pinjaman.

Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Robert Pakpahan, pada akhir tahun 2015, pemerintah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) untuk membiayai APBN di tahun selanjutnya. “Pertama kalinya Pemerintah melakukan transaksi *prefunding* untuk pembiayaan APBN 2016. Ini dilakukan untuk memastikan kegiatan-kegiatan pemerintah termasuk pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan di awal tahun dapat berjalan dengan baik. Tidak terkendala pembiayaannya karena belum maksimalnya penerimaan Negara di awal tahun,” ujarnya.

Pada 2016, selain bersumber dari APBN, anggaran pembangunan infrastruktur dipenuhi melalui utang, yaitu pinjaman luar negeri dan penerbitan SBSN (sukuk). Alokasi pinjaman luar negeri untuk membiayai proyek tahun 2016 sebesar Rp38,26 triliun dengan 65 persen dari total pembiayaan digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur. Di sisi lain, alokasi SBSN untuk membiayai proyek tahun 2016 sebesar Rp13,67 triliun untuk tiga Kementerian/Lembaga, yaitu Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Agama. Selanjutnya, pada skema

pembiayaan melalui penugasan kepada BUMN, pembiayaan ini digunakan untuk penyediaan infrastruktur layanan publik yang membutuhkan pendanaan besar, bersifat jangka panjang, dan memiliki kelayakan finansial yang marjinal. Melalui skema tersebut, pemerintah memberikan jaminan atas proyek tersebut.

Kemudian, guna mendukung pengembangan infrastruktur dengan skema pembiayaan melalui KPBU (Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha), Kementerian Keuangan membentuk PPP unit yang disebut Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (PDPI). Unit yang berada di bawah DJPPR ini bertugas mengelola tiga fasilitas pembiayaan infrastruktur dengan skema KPBU.

Pertama, penyiapan proyek melalui skema *Project Development Fund* (PDF) berupa fasilitas pemerintah untuk penyiapan proyek dan pendampingan transaksi. Fasilitas ini diberikan kepada penanggung jawab proyek kerja sama agar proyek tersebut menarik dan siap ditawarkan kepada investor. Saat ini, proyek yang mendapatkan fasilitas ini yakni proyek kereta api bandara Soekarno Hatta – Manggarai dan proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan.

Kedua, dukungan kelayakan atau disebut *Viability Gap Fund* (VGF) atas sebagian biaya konstruksi terhadap proyek KPBU. Fasilitas ini merupakan dukungan pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial atas porsi tertentu dari biaya konstruksi proyek kerja sama. Kini, Kemenkeu telah memberikan persetujuan prinsip dukungan kelayakan untuk proyek SPAM Bandar Lampung,

proyek SPAM Umbulan, dan proyek SPAM Semarang Barat.

Lalu ketiga, pemerintah bersama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) telah memberikan jaminan untuk proyek IPP PLTU Jawa Tengah (2 x 1000 MW). Pemerintah juga berkomitmen memberikan penjaminan kepada proyek mulut tambang 9 dan 10 di Sumatera Selatan. Adapun skema penjaminannya berupa penjaminan bersama/*co-guarantee* dengan pemerintah atas prinsip pembagian risiko.

Robert Pakpahan menuturkan Skema KPBU memungkinkan Pemerintah mengadakan aset tanpa menambah kebutuhan belanja termasuk kewajiban/pinjaman Pemerintah dalam jangka pendek. “Selain itu, skema ini menjanjikan proses yang transparan dan kejelasan pengembalian investasi kepada pihak swasta sebagaimana dinyatakan dalam kontrak kerja sama,” tuturnya.

Lebih jauh, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan PMK Nomor 190/PMK.08/2015 untuk penerapan skema *Availability Payment* (AP) untuk memastikan pengembalian investasi bagi badan usaha. AP diharapkan dapat meningkatkan minat berinvestasi karena adanya kepastian pengembalian investasi bagi badan usaha. Proyek pertama KPBU yang menggunakan skema AP di Indonesia ialah Proyek Palapa Ring.

Selain pemberian fasilitas tersebut, pemerintah juga mendukung pembangunan infrastruktur melalui mekanisme penyaluran Penyertaan Modal Negara (PMN). Hingga saat ini,

ada lima BUMN yang berada di bawah koordinasi Kemenkeu yang bergerak di bidang pembiayaan dan penjaminan infrastruktur. Kelima BUMN tersebut, yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, PT Sarana Multigriya Finansial, PT Geo Dipa Energi, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Dari tahun ke tahun, alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan kepada BUMN/Lembaga tersebut semakin berkembang sesuai dengan tujuan peruntukan PMN terkait. Secara umum, tujuan pemberian PMN tersebut untuk memperbaiki struktur permodalan BUMN dan/atau meningkatkan kapasitas usaha BUMN.

Sebagai contoh, pada APBN-P 2015, PT SMI (Persero) mendapatkan alokasi PMN yang cukup besar yang berasal dari pengalihan investasi Pemerintah dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Pengalihan tersebut bertujuan untuk penguatan permodalan sebagai persiapan dalam rangka pembentukan Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI) atau *Indonesia Development Bank* yang diharapkan akan mengisi gap pembiayaan pembangunan di Indonesia.

Saat ini, pemerintah juga tengah mengupayakan percepatan pembangunan infrastruktur yang ada di daerah timur Indonesia. Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara memberikan arahan untuk mendukung upaya tersebut melalui pembiayaan dan penjaminan proyek-proyek infrastruktur di wilayah timur Indonesia

Tantangan

Kadek Dian Sutrisna, Kepala LPEM Universitas Indonesia melihat tantangan utama pembiayaan infrastruktur ialah terbatasnya dana domestik dibanding kebutuhan dana pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, kata Kadek, diperlukan mobilisasi dana domestik melalui peningkatan *financial literacy* (melek finansial) dari masyarakat.

“Dengan peningkatan *financial literacy*, masyarakat dapat memanfaatkan jasa institusi finansial seperti perbankan terutama dalam menabung. Ini menjadi sumber dana yang dapat digunakan untuk pembiayaan infrastruktur. Seperti misalnya di Jepang, optimalisasi peran kantor pos sebagai *bank post* dapat memobilisasi dana masyarakat sampai ke pelosok,” katanya.

Di samping itu, Kadek juga memandang pentingnya pendalaman pasar (*financial deepening*). Upayanya dengan penyediaan instrumen-instrumen finansial jangka panjang sehingga akan menarik minat investor untuk masuk ke pasar finansial Indonesia dan dapat digunakan dalam pembiayaan infrastruktur.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut, Kadek menilai kunci dari pembiayaan infrastruktur adalah bagaimana meningkatkan *return* bukan hanya secara ekonomi, melainkan juga secara finansial. Peningkatan *return* secara finansial akan menarik minat investor baik domestik maupun asing dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur. “Untuk meningkatkan *return* secara finansial maka ketidakpastian seperti pembebasan lahan dan tumpang tindih peraturan harus diselesaikan terlebih dahulu.”

Untuk masalah pembebasan lahan, Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Kekayaan negara membentuk Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Lembaga ini memiliki peran tambahan sebagai *landbank* (bank tanah) terkait pelaksanaan pendanaan pengadaan tanah untuk mendukung pembangunan infrastruktur.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Sony Loho menuturkan bahwa melalui peran LMAN tersebut, pemerintah dapat mempercepat proses pengadaan tanah yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur. “Saat ini LMAN sedang menyusun perangkat hukum pelaksanaan fungsi *landbank*, yaitu melalui penyiapan Rancangan Peraturan Presiden dan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan sebagai acuan teknisnya,” tutur Sony.

Teks lin Kurniati



Laporan Utama

Pembangunan LRT di Palembang.

Sebentar Lagi Sumsel Punya LRT

Foto lin Kurniati

Presiden Joko Widodo secara jelas mengamanatkan untuk membangun dari daerah, termasuk Sumatera Selatan. Di Bumi Sriwijaya ini kini tengah dibangun jalur kereta ringan atau lebih dikenal dengan *Light Rail Transit* (LRT) dan Tol Trans Sumatera yang termasuk ke dalam 30 proyek prioritas nasional.

Pembangunan LRT bukan hanya dilakukan di ibukota negara. Proyek serupa tengah berjalan di Palembang untuk menghubungkan Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II dengan Kompleks Olahraga Jakabaring.

Bernadette Robiani, ekonom Universitas Sriwijaya mengungkapkan, Sumatera Selatan, termasuk kota Palembang dibelah oleh Sungai Musi menjadi dua daerah yang disebut Seberang Ulu dan Seberang Ilir. Dengan aliran sungai sepanjang 750 kilometer, saat ini kedua daerah tersebut hanya dihubungkan oleh Jembatan Ampera dan Jembatan Musi II. Akibat kepadatan lalu lintas kendaraan yang semakin tinggi, kemacetan di area kedua jembatan tersebut kerap tak terhindarkan. “Setiap pagi dan sore kendaraan sering tidak bisa bergerak sehingga kita memang harus memikirkan transportasi alternatif,” katanya.

Dijelaskan Bernadette lebih lanjut, selama puluhan tahun daerah Seberang Ilir jauh lebih berkembang karena menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan. Agar pembangunan lebih merata, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan mulai memindahkan sebagian kantor pemerintahan ke Seberang Ulu, tempat yang sama dimana Kompleks Olahraga Jakabaring dibangun. Perubahan ini tentu membutuhkan dukungan sarana dan prasarana transportasi yang memadai.

Alex Neordin, Gubernur Sumatera Selatan mengatakan, pembangunan LRT mungkin terlihat biasa saja, namun sebenarnya merupakan suatu lompatan besar bagi daerah di luar Pulau Jawa. LRT Palembang mulai dibangun sejak Oktober 2015 dan ditargetkan selesai pada Juni 2018 sebelum pelaksanaan Asian Games 2018 di Palembang dan Jakarta. Proyek ini diperkirakan akan menelan biaya sekitar Rp 7,3 triliun untuk jalur sepanjang 23 kilometer.

Ditanya mengenai pengaruh pembangunan infrastruktur Sumatera, Bernadette mengatakan efek langsung terhadap ekonomi Sumatera Selatan mulai terasa. “Saat ini mulai bermunculan rumah-rumah makan dan rumah kontrakan untuk mengakomodir kebutuhan tenaga kerja dari luar Palembang yang terlibat dalam pembangunan. Belum lagi kalau kita berbicara mengenai tambahan permintaan akan bahan bangunan,” tuturnya.

Bernadette mengingatkan, Pemrov Sumatera Selatan harus memikirkan pemanfaatan LRT paska

perhelaaan Asian Games 2018. Teknis perawatan dan pengelolaan LRT perlu disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat Palembang. “Kriminalitas di kota ini masih tinggi. Keamanan dan kenyamanan penumpang harus terjamin. Jangan sampai terjadi penodongan seperti yang sering terjadi di dalam bus kota. Tarif yang dikenakan juga perlu dipertimbangkan sehingga ekonomis dan masyarakat mau menggunakannya,” katanya.

Tol Trans Sumatera

Proyek lain yang juga akan melintasi Sumatera Selatan adalah Jalan Tol Trans Sumatera yang akan menghubungkan Pulau Sumatera dari Aceh hingga Lampung. Total Jaringan tol Trans Sumatera direncanakan mencapai 2.048 kilometer dan terdiri dari 24 ruas. Sumatera Selatan sendiri akan dilalui lima ruas jalan tol yaitu ruas Palembang-Indralaya, Palembang-Tanjung Api-api, Indralaya-Muara Enim, Muara Enim-Lahat-Lubuk Linggau, dan Lubuk-Linggau-Curup-Bengkulu.

Adapun yang saat ini tengah dikerjakan adalah ruas Palembang-Indralaya (Palindra) sepanjang total 22 kilometer. Jalan tol Palindra diperkirakan menelan dana sekitar Rp3,4 triliun yang bersumber dari Penyertaan Modal Negara (PMN), investasi swasta dan pinjaman ke PT Hutama Karya sebagai kontraktor yang ditunjuk pemerintah.

Diceritakan Bernadette, selama ini Sumatera Selatan mengandalkan kereta api untuk mengangkut komoditi seperti sawit, tebu, karet, dan batubara antar provinsi. Kereta itu pun masih menggunakan rel tunggal (*single track*). Akibatnya waktu tempuh yang diperlukan menjadi lama. “Kalau jalan tol ini jadi, akan banyak sekali efisiensi. Selain lalu lintas orang dan barang menjadi lebih cepat, konektivitas yang ada akan mendorong berkembangnya industri pengolahan karena biaya logistik menjadi lebih murah,” tutur Bernadette.

Hingga Maret 2016, *progress* pembangunan jalan tol Palindra sudah mencapai 11,26 persen. Meski membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, Presiden sempat meminta agar pembangunan Tol Trans Sumatera dilihat dari manfaat jangka panjangnya. Menurut Presiden, infrastruktur harus disiapkan lebih dahulu sebelum didahului oleh pembangunan perumahan dan gedung lainnya.

Teks Irma Kesuma

Pembangunan Infrastruktur Selalu Menjadi Prioritas

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

Foto Bagus Wijaya



Tahun 2016 merupakan tahun percepatan kerja yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Tak terkecuali pembangunan infrastruktur yang turut dipercepat demi pertumbuhan perekonomian yang lebih baik. Selaras dengan nawacita Presiden Joko Widodo, yakni membangun Indonesia dari pinggiran, konektivitas di seluruh wilayah di Indonesia akan semakin diperkuat. Pembangunan infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan geliat perekonomian, khususnya di daerah. Simak wawancara Media Keuangan dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengenai pembiayaan infrastruktur di Indonesia.

Pemerintah bertekad mempercepat dan mengoptimalkan pembangunan infrastruktur di tahun 2016. Terkait hal itu, bagaimana postur pembiayaan infrastruktur dalam APBN 2016?

Dalam APBN, belanja infrastruktur tidak akan diganggu gugat karena sudah menjadi prioritas. Saya tekankan bahwa APBN hanya menangani infrastruktur dasar. Sedangkan infrastruktur yang memiliki nilai komersial akan kita dorong ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau ke sektor swasta.

Apakah ada pengurangan postur belanja infrastruktur dalam APBN-P 2016?

Kami akan mengusahakan seminimal mungkin. Jika ada, kemungkinan hanya untuk proyek-proyek yang tidak bisa dieksekusi tahun ini. Hal itu karena ada hambatan pembebasan lahan, izin yang belum

selesai, dan sebagainya. Untuk proyek-proyek yang sudah jalan, tentu akan kami prioritaskan, tidak akan diganggu gugat.

Apakah ada prioritas pembiayaan infrastruktur pada APBN-P 2016?

Semua jenis infrastruktur bersifat penting. Perlu kita pahami bahwa kita berupaya memperkuat konektivitas infrastruktur di darat dan laut, seperti jalan raya dan pelabuhan. Prioritasnya yaitu infrastruktur yang memenuhi hajat hidup orang banyak. Kebutuhan mendasar lainnya yang menjadi perhatian khusus, yaitu listrik. Kita sudah sangat ketinggalan dalam hal ini, padahal listrik berfungsi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi kita ingin berfokus ke listrik, baik dalam hal pembangkit maupun jaringan transmisinya.

Bagaimana skema pembiayaan yang digunakan pemerintah dalam membiayai infrastruktur di Indonesia?

Skema pertama berasal dari APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kedua, berasal dari BUMN. Ketiga, berasal dari sektor swasta, baik dari swasta murni (tanpa dukungan pemerintah) atau dalam bentuk kerja sama pemerintah-swasta. Kerja sama pemerintah-swasta ini dikenal dengan Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Secara umum, apa tantangan terbesar dalam pembiayaan infrastruktur di Indonesia?

Pembiayaan itu penting, tapi bukan tantangan yang paling berat. Menurut saya, tantangan terbesar yaitu penyiapan *feasibility* proyek. Jika suatu proyek akan ditawarkan kepada pihak ketiga, maka proyek ini harus memiliki *feasibility study* (studi kelayakan) yang sangat kuat. Selain itu juga harus ada jaminan bahwa segala urusan perizinan dan pembebasan tanah tidak akan mengganggu *feasibility* proyek itu di kemudian hari.

Sejalan dengan cita-cita membangun Indonesia dari pinggiran, sejauh mana peran dana desa yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur?

Mengingat dana desa ini baru diluncurkan tahun lalu, penggunaannya untuk infrastruktur belum terlihat signifikan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, kita harapkan penggunaan dana desa untuk membangun infrastruktur akan semakin pesat.

Kita sudah membuat Surat Keputusan Bersama antara tiga menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Isi kesepakatan tersebut menegaskan bahwa porsi belanja dana desa hanya untuk pembangunan infrastruktur. Jika pembangunan infrastruktur sudah berjalan dengan baik, baru bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Selain itu, kita juga mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus demi percepatan pembangunan infrastruktur.

Bagaimana prospek investasi infrastruktur Indonesia di masa mendatang?

Saat ini Indonesia memang masih ketinggalan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas infrastruktur. Saya lihat prospek ke depan sangat besar. Untuk itu, hal ini menjadi tidak hanya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk mengejar ketertinggalan, namun bisa dijadikan peluang untuk sektor swasta. Saya ingin mendorong perusahaan swasta di dalam negeri untuk terlibat lebih banyak dalam proyek infrastruktur di Indonesia.

Pada Sidang Tahunan Islamic Development Bank (IDB) ke-4, Indonesia mendapat kehormatan sebagai tuan rumah. Dalam acara bertaraf internasional tersebut, pemerintah Indonesia mengusulkan tema infrastruktur dan keuangan inklusif. Apa yang mendasari pemilihan tema infrastruktur?

Pertama, selama ini operasi IDB di Indonesia memberikan porsi besar terhadap pendidikan tinggi, yaitu pembangunan kampus. Kali ini pemerintah ingin IDB memberikan porsi lebih besar terhadap infrastruktur di Indonesia. Kedua, pembiayaan infrastruktur ingin lebih ditingkatkan dengan pendekatan syariah. Dengan adanya pembiayaan syariah, berarti akan membuka peluang lebih besar bagi para investor baru yang hanya ingin terlibat dalam transaksi bersifat syariah.

Teks Pradany Hayyu

Pemerintah Serahkan Tanggapan atas Konsep Hasil Pemeriksaan LKPP 2015

Foto
Dok. Biro KLI

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mewakili pemerintah menyampaikan Tanggapan Pemerintah Atas Konsep Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2015. Menkeu mengungkapkan bahwa pemerintah akan menggunakan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan koreksi dan penyesuaian atas LKPP 2015.

"Hasil pemeriksaan dan rekomendasi oleh BPK akan digunakan juga oleh pemerintah untuk melakukan perbaikan. Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara di masa yang akan datang," jelas Menkeu di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Senin (9/5).

Pada kesempatan yang sama, Ketua



BPK Harry Azhar Aziz mengatakan bahwa tanggapan pemerintah ini penting untuk memberikan informasi yang seimbang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. Setelah menerima tanggapan pemerintah, lanjutnya, BPK akan segera menyelesaikan laporan hasil pemeriksaannya untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. "Sebagaimana kita ketahui bahwa hasil dari pemeriksaan ini adalah berupa opini atas LKPP tahun 2015," ungkapnya.

Harry menambahkan, saat ini harapan masyarakat terhadap opini BPK atas laporan keuangan terus meningkat, karena laporan BPK merupakan tolok ukur kualitas laporan keuangan. "Masyarakat dapat menilai sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam menyediakan informasi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara kepada publik," terangnya.

Sebelumnya, pemerintah telah menyerahkan LKPP (*unaudited*) kepada BPK pada 30 Maret 2016. Atas hal tersebut, BPK mengapresiasi langkah pemerintah yang telah menyerahkan LKPP (*unaudited*) tahun anggaran 2015 secara tepat waktu.

Sebagai informasi, LKPP tahun anggaran 2015 memiliki nilai lebih karena merupakan momentum besar dalam sejarah akuntansi sektor publik di Indonesia. LKPP tahun anggaran 2015 menandai mulai diberlakukannya pelaporan keuangan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual di seluruh instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Oleh karena itu, BPK juga mengapresiasi berbagai upaya pemerintah dalam menerapkan SAP berbasis akrual di tahun 2015.

Teks Amelia Safitri

Sebagai *Host*, Indonesia Sukses Gelar Sidang Tahunan IDB ke-41

Foto
Dok. Biro KLI



Indonesia baru saja menjadi tuan rumah Sidang Tahunan Islamic Development Bank (IDB) ke-41 di Jakarta dari 16-19 Mei 2016. Dalam kesempatan ini, Pemerintah Indonesia dan IDB menandatangani sejumlah perjanjian proyek, antara lain terkait pengembangan pendidikan tinggi dan perbaikan kualitas perkampungan kumuh.

Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro menerangkan, salah satu proyek yang ditandatangani kedua belah pihak ialah pengembangan pendidikan tinggi senilai USD176,5 juta. “Ada empat lembaga pendidikan tinggi yang akan menerima, yaitu Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, Universitas Malang di Jawa Timur, Universitas Jember di Jawa Timur, dan Universitas Mulawarman di Kalimantan

Timur,” jelasnya saat konferensi pers di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (19/05).

Selain itu, Pemerintah Indonesia dan IDB juga menandatangani perjanjian pinjaman untuk proyek perbaikan kampung kumuh (*national slum upgrading project*) senilai USD329,76 juta. Kedua belah pihak juga menyepakati kerja sama untuk pengembangan jaringan transmisi Perusahaan Listrik Negara (PLN) senilai USD330 juta dalam waktu dekat. Menurut Menkeu, perjanjian proyek yang ditandatangani dalam kesempatan tersebut merupakan bagian dari Member Country Partnership Strategy (MCPS) periode 2016-2020 senilai total USD5,2 miliar.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Islamic Development Bank

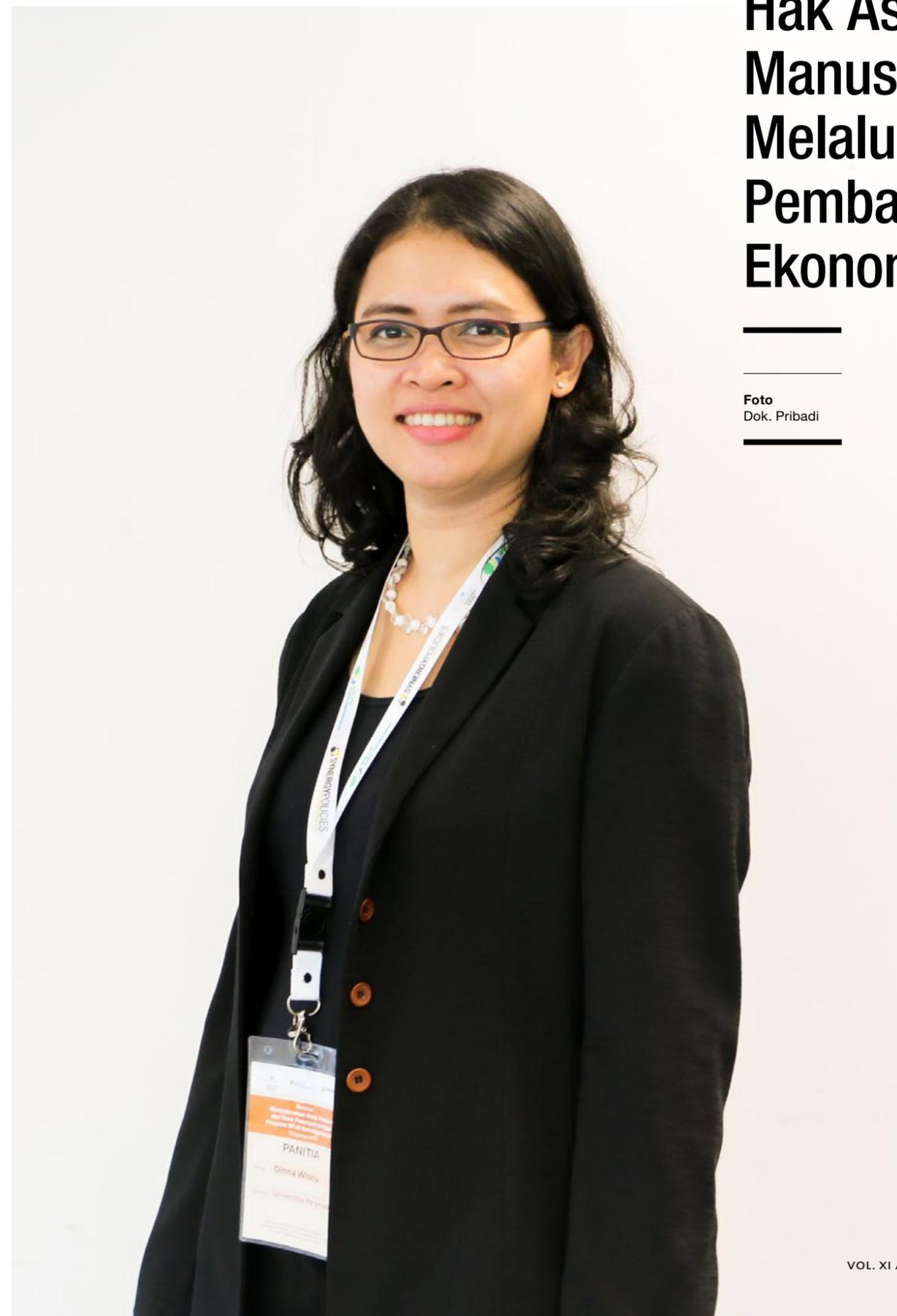
(IDB), Ahmad Mohamed Ali Al Madani mengapresiasi Pemerintah Indonesia yang telah sukses menyelenggarakan Sidang Tahunan IDB ke-41. Ia menilai, sidang tahunan kali ini merupakan salah satu pertemuan Dewan Gubernur IDB yang paling sukses.

Pemerintah menyadari bahwa seluruh potensi Indonesia belum dioptimalkan. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan reformasi guna membuka berbagai potensi yang dimiliki Indonesia. Hal ini juga seperti yang disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat pembukaan Sidang Tahunan pada Selasa (17/05). Menurutnya, perubahan dan reformasi mutlak dilakukan untuk kemajuan. Hal yang sangat penting ialah menggerakkan ekonomi bersama untuk kemakmuran masyarakat.

Teks Novita Asri H.

Penegakan Hak Asasi Manusia Melalui Pembangunan Ekonomi

Foto
Dok. Pribadi



Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk hak ekonomi merupakan hal yang fundamental dari konstitusi di setiap negara yang beradab. Namun, acap kali terdapat celah yang membuat hak sebagian masyarakat sulit terpenuhi. Bagaimana seharusnya Indonesia membangun tanah air dengan manusiawi? Dinna Wisnu, Perwakilan Indonesia pada Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia, memaparkannya kepada Media Keuangan.

Sebenarnya apa saja hak-hak ekonomi setiap individu?

Definisi hak ekonomi berbeda-beda di setiap negara, tergantung ideologi yang dianut. Namun, lembaga-lembaga dunia berusaha mencari definisi yang dapat diterima semua pihak. Target-target pembangunan internasional memuat hak ekonomi bersanding dengan hak sosial budaya. Intinya setiap individu berhak menikmati buah-buah pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Contohnya hak atas pendidikan, perumahan, pangan, pekerjaan, kesehatan, jaminan sosial, hak sebagai pekerja, hak atas lingkungan hidup yang bersih dan bebas polusi, hak untuk bebas korupsi, juga hak akan ilmu pengetahuan dan diakui tradisi serta keunikannya sebagai individu.

Bagaimana Anda memandang HAM di bidang ekonomi?

Perlindungan HAM di bidang ekonomi tidak terbatas pada pemberian kesempatan yang sama. Bahkan ketika seseorang sudah mendapatkan kesempatan dan gagal memanfaatkannya, ia pun tetap harus dilindungi dan dibantu untuk mendapatkan haknya. Perlindungan HAM mensyaratkan agar tidak ada satu pun manusia yang mengalami diskriminasi, pengucilan, intimidasi, serta penolakan untuk menikmati haknya.

Seringkali orang salah kaprah. Isu ini



Pasar mendorong perekonomian.

bukan sekadar menciptakan regulasi yang menjamin kesempatan, tetapi juga aturan implementasi yang jelas. Bahkan aturan yang ada belum tentu mengenali ragam kemampuan individu dalam memanfaatkan kesempatan. Akibatnya peluang tersebut tidak membawa dampak positif pada kelompok yang sebenarnya kita sasar.

Seperti apa kesempatan yang tidak bisa dimanfaatkan tersebut?

Contohnya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dengan aturan wajib belajar 12 tahun dan bebas biaya di sekolah negeri. Masalahnya, sejumlah besar anak kesulitan mengakses sekolah. Ada yang harus naik kapal dan menunggu ombak tenang dulu atau harus melewati hutan. Ada juga anak yang berkebutuhan khusus sehingga sekolah menolak menerimanya karena merasa tidak punya fasilitas memadai. Ada pula yang terlahir kurang gizi sehingga kerdil dan daya tangkapnya di sekolah kurang. Meski lulus dari sekolah, pendidikan yang didapat tidak

menjamin penghidupan yang layak bagi mereka.

Bagaimana Anda melihat kesetaraan dan akses ekonomi masyarakat ASEAN?

Pelaksanaan Hak Ekonomi tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan Hak Sipil dan Politik. Indonesia relatif lebih baik dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya karena kita sudah memajukan penegakan dan perlindungan HAM sejak reformasi di awal tahun 2000. Saya sebut relatif karena dibanding Kamboja, Laos, Myanmar situasi kita jauh lebih baik. Namun, kita masih tertinggal dibandingkan Thailand, Singapura, dan Malaysia khususnya di bidang pendidikan dan pendapatan perkapita.

Apa yang bisa Indonesia pelajari dari mereka?

Pendidikan universal sudah tercapai di Singapura dan Malaysia. Angka putus sekolah bukan lagi masalah, bahkan pemerintahnya sudah masuk pada upaya meningkatkan jumlah lulusan S1 dan S2.

Kualitas guru dan pendidikan sudah relatif sama di seantero negeri. Dari segi mutu pendidikan, kinerja Thailand di bidang sains melebihi Indonesia berdasarkan data The Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2006, 2009, dan 2012.

Contoh lain, di bidang kesehatan Indonesia tertinggal di belakang Thailand, Singapura, dan Malaysia dari segi jumlah penduduk yang memiliki asuransi jaminan sosial wajib. Di negara-negara tersebut, fasilitas kesehatan seperti klinik dan rumah sakit relatif memadai, tidak ada kesenjangan antara kota dan perdesaan. Di Indonesia kita menyaksikan kesenjangan yang luar biasa antara pulau Jawa dan luar Jawa. Tidak hanya kekurangan fasilitas dan tenaga kesehatan, obat dan alat kesehatan juga tidak lengkap atau bahkan tidak ada.

Hal apa yang paling penting dalam menjamin pemenuhan hak ekonomi?

Dalam konteks HAM, pemenuhan hak ekonomi ditentukan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat. Gagasan pembangunan perlu mendengarkan masyarakat yang akan menerima dampaknya. Misalnya, masyarakat adat yang telah ratusan tahun hidup di sebuah kawasan hutan dan hadir lebih dahulu sebelum Republik Indonesia berdiri, memiliki hak ekonomi yang tergantung dari hasil hutan. Pembangunan kawasan hutan yang berpotensi mengganggu akses ekonomi masyarakat adat terhadap hasil hutan harus dicari jalan keluarnya. Dengan begitu, mereka tidak terpinggirkan dari pembangunan.

Selain itu, pemenuhan hak ekonomi harus peka terhadap ragam kemampuan dan kepentingan kelompok masyarakat. Contohnya, ketika kita bicara tentang upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi

ke angka tujuh persen, maka pilihan kebijakan yang ada perlu memperhitungkan kelompok masyarakat yang akan tertinggal. Misalnya, ketika pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur atau deregulasi, biasanya terjadi penggusuran, peningkatan kemacetan dan polusi, dan bisnis yang gulung tikar sehingga mengakibatkan PHK. Hal-hal ini perlu diantisipasi sehingga tidak menghambat pemenuhan HAM di bidang ekonomi.

Hal apa yang menurut Anda medesak untuk didiskusikan?

Perlu disadari pemenuhan HAM bukanlah beban bagi perekonomian, melainkan aset dan investasi yang memberi dorongan untuk tumbuh. Kita harus sadar bahwa perekonomian di era tahun 2000-an ini sangat ditentukan oleh kemampuan negara dan dunia usaha dalam menciptakan dan mengelola *demand*. Selain itu, negara yang perekonomiannya kuat perlu memanfaatkan rantai produksi regional atau global. Artinya negara pun perlu peka pada keinginan konsumen akan produk yang ramah HAM. Misalnya tidak dibeli dari pekerja yang hidup seperti budak, tidak dibeli dari lingkungan hidup yang dirusak, tidak dibeli dari negara yang memarginalisasi petani. Tentunya, pelaku usaha juga perlu difasilitasi dengan baik agar mampu memperluas pasar. Negara tidak bisa sendirian lagi dalam mengelola ekonomi. Justru harus mendengarkan konsumen, pekerja dan pebisnis.

Konsolidasi apa yang perlu dilakukan di tingkat ASEAN terkait hal ini?

Di tingkat ASEAN, saat ini sedang terus dibangun upaya *mainstreaming* pendekatan HAM dalam pilar ekonomi ASEAN. Artinya, secara bertahap para pelaku dan pengambil kebijakan di bidang

ekonomi diajak untuk memperhitungkan dampak dan cara-cara alternatif merancang dan menerapkan kebijakan supaya yang dirugikan lebih terkendali.

Adakah Negara yang dapat dijadikan benchmark pembangunan ekonomi berbasis hak asasi manusia?

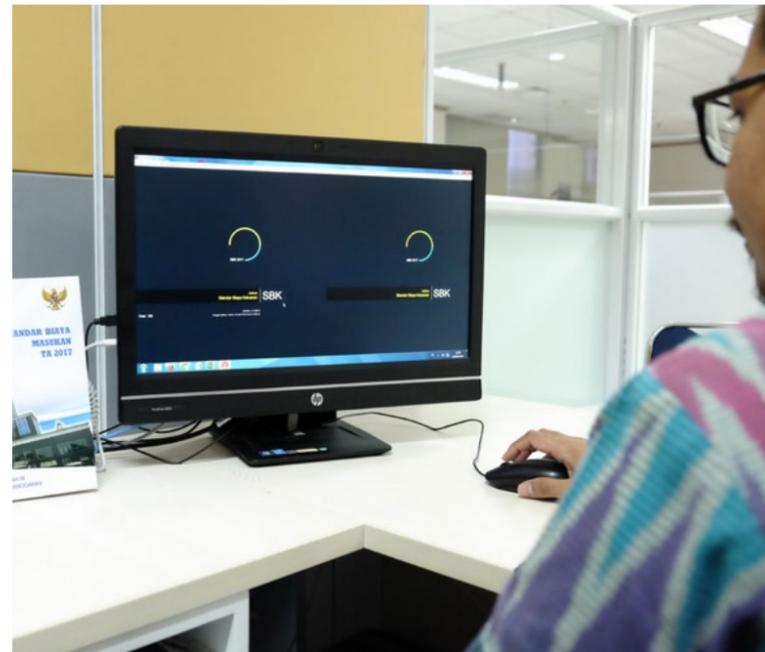
Negara yang relatif berhasil melakukan pembangunan ekonomi berbasis HAM adalah Uni Eropa (UE), meskipun tidak sempurna. Misalnya, untuk transaksi keuangan dan penyusunan perjanjian kerja sama antarnegara di UE dijamin bebas kemungkinan korupsi. Hal ini menarik karena mereka melihat bahwa dengan menghindari korupsi maka kebijakan dapat dibuat lebih transparan, lebih akuntabel, dan lebih bertanggungjawab sehingga memperkecil kemungkinan terjadi kecurangan yang merugikan kelompok-kelompok yang tidak berdaya.

Kebijakan fiskal seperti apa yang perlu diprioritaskan untuk memenuhi hak ekonomi seluruh masyarakat?

Hal pertama yang perlu disusun ulang adalah alokasi anggaran. Di republik ini, kita sulit bicara HAM karena ruang fiskal yang tersedia sangat terbatas. Rata-rata kementerian menyedot 60-70 persen untuk belanja pegawai, padahal di dalam kementerian itu sendiri selalu terjadi salah penempatan orang atau justru yang berpotensi tenggelam dalam sistem. Artinya ini hambatan besar untuk punya orang dan sistem yang bisa memikirkan hal-hal di luar birokrasi negara. Jika hal ini tidak diubah, masyarakat hanya bisa terus berteriak dan pelaku-pelaku yang menentukan sekadar menunjukkan ketidakberdayaan untuk melakukan hal-hal yang bermakna sesuai standar HAM.

Teknologi Informasi Kuat Wujudkan Sistem Penganggaran Kuat

Direktorat Sistem Penganggaran, DJA



Cikal bakal Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) saat ini yaitu Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan (DJAPK) yang dibentuk pada tahun 2004. Pada tahun 2010, DJAPK terpecah menjadi dua, yaitu DJA dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). DJA dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.

Saat masih berstatus DJAPK, tugas dan fungsi Direktorat Sistem Penganggaran (SP) berada di masing-masing unit teknis. Kini, Direktorat SP bertanggung jawab menyiapkan sistem peraturan dan sistem teknologi informasi yang mendukung kinerja seluruh unit di DJA. Peraturan yang dimaksud meliputi

Peraturan Direktur Jenderal Anggaran, Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Rancangan Peraturan Pemerintah, serta Peraturan Presiden (Perpres).

Sebagai perumus kebijakan

Ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu yang lalu, Direktur SP Agung Widiadi menjelaskan lebih lanjut mengenai Perpres yang pernah disusun oleh Direktorat SP. Salah satunya yaitu Perpres No 39 tahun 2012 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga. Substansi dan perumusan Perpres tersebut dilaksanakan oleh Direktorat SP.

Salah satu peran strategis dari Direktorat SP adalah perumusan PMK yang mengatur kementerian/lembaga dalam menyampaikan dokumen atau usulan anggaran kepada Kementerian

Keuangan. Usulan anggaran tersebut dikenal dengan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) nantinya yang akan ditelaah oleh Direktorat Jenderal Anggaran I, Direktorat Jenderal Anggaran II, dan Direktorat Jenderal Anggaran III. Usulan yang telah disetujui pimpinan nantinya akan masuk sistem teknologi informasi untuk kemudian menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Lebih lanjut, Agung menjelaskan peran strategis lainnya dalam mewujudkan visi DJA, yakni memacu pengelolaan APBN yang berkualitas untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Peran tersebut adalah dukungan teknologi informasi yang ditujukan untuk memperlancar kinerja unit-unit lain di lingkup DJA. Direktorat SP merupakan satu-satunya direktorat yang memiliki



Foto
Dok. DJA

subdirektorat di bidang teknologi informasi. “Kami memiliki pranata komputer yang membantu penyiapan aplikasi, baik aplikasi yang digunakan seluruh K/L maupun dalam internal DJA,” jelas Agung.

Dukungan teknologi informasi tersebut juga memastikan aplikasi RKAKL mampu terintegrasi dengan aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). SPAN adalah sistem aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk mendukung otomatisasi sistem dari pengguna anggaran di setiap K/L. “SPAN yang tergolong aplikasi baru membutuhkan kesiapan sumber daya manusia yang mumpuni. Kami berusaha memenuhi hal itu,” jelas Agung.

Saat ini aplikasi SPAN telah murni dilaksanakan secara *online*, sehingga aplikasi RKAKL juga harus dijalankan secara otomatis. Agung menambahkan, perubahan proses penyampaian anggaran dari manual ke otomatis ini tidak lah mudah. Pada awalnya, tidak semua proses disampaikan melalui aplikasi. Untuk berjaga-jaga, proses juga dilakukan dengan pencatatan manual. “Teknologi informasi kini telah menjadi kebutuhan tiap institusi. Banyak manfaat yang

dirasakan organisasi dengan kehadiran berbagai aplikasi,” tuturnya.

Agung menegaskan, ke depan, ia ingin memaksimalkan sistem Anggaran Berbasis Kinerja. Cara penyusunan anggaran ini tidak didasarkan pada analisa rangkaian kegiatan yang harus dihubungkan dengan tujuan yang telah ditentukan, namun lebih dititikberatkan pada kebutuhan untuk belanja/pengeluaran. Selain itu, sistem pertanggung jawabannya tidak diperiksa dan diteliti apakah dana tersebut telah digunakan secara efektif dan efisien atau tidak. “Indikator kinerja yang digunakan K/L masih banyak yang belum pas dengan *logic model* (kerangka berpikir secara logis),” jelasnya.

Sistem ini diharapkan akan memperbaiki *output* yang dihasilkan oleh K/L. Saat ini, sebagian besar *output* yang disampaikan berupa laporan hasil studi. Idealnya, *output* strategis K/L tidak terlalu banyak, namun di tingkat Eselon I bisa dijabarkan lebih lanjut. “Bentuk *output*-nya kalau digambarkan membentuk piramida. Semakin ke atas semakin sedikit,” ujarnya.

Penyempurnaan Aplikasi ADIK dan SBK

Dalam implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja, Direktorat SP

mengupayakan peningkatan kualitas informasi kinerja dengan penyempurnaan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK). Terkait hal itu, Agung menambahkan, Direktorat SP juga telah mengimplementasikan aplikasi Standar Biaya Khusus (SBK). Aplikasi SBK merupakan *software* aplikasi komputer yang dibuat sebagai sarana alat bantu bagi Kementerian Negara/Lembaga untuk menghasilkan Standar Biaya Khusus (SBK) yang baik, sesuai dengan Petunjuk Penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK) dan dapat diintegrasikan dalam aplikasi RKAKL.

Direktorat SP sendiri terdiri dari empat subdirektorat, yaitu Subdirektorat Transformasi Sistem Penganggaran, Subdirektorat Standar Biaya, Subdirektorat Evaluasi Kinerja Penganggaran, dan Subdirektorat Teknologi Informasi Penganggaran. Dengan jumlah total pegawai sebanyak 95 orang, Direktorat SP berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan mengikutkan pegawainya di berbagai pelatihan di BPPK (Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan). Di samping itu, untuk memaksimalkan kapasitas dan kompetensi mereka, dilakukan pula berbagai *workshop* dan seminar di bidang penganggaran.

Teks Pradany Hayyu

Selalu Siap

Hidup bagai bertempur di medan perang. Tak sekadar butuh senjata, tetapi juga butuh strategi untuk raih kemenangan. Iqbal Islami buktikan dirinya selalu siap menghadapi tantangan.



Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Mungkin pepatah lama ini sesuai untuk menggambarkan sosok Iqbal Islami, seorang widyaiswara yang kini dipercaya menjadi Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Memiliki bapak yang berprofesi sebagai guru membuat anak pasangan Moehammad dan Ratna ini terbiasa hidup di lingkungan yang lekat dengan dunia pendidikan.

Menghabiskan masa kecil di Tanjung Karang, Bandar Lampung, kehidupan Iqbal justru berbeda dengan kebanyakan anak seusianya. Bila anak-anak lain harus dipaksa belajar oleh orangtuanya, Iqbal justru siap mengatur sendiri waktu belajarnya. “Orang tua saya tidak pernah menanyakan pekerjaan rumah sudah dikerjakan atau belum. Mereka percaya saja sehingga saya terbiasa bertanggung jawab,”ujarnya.

Kedua orangtuanya selalu mengajarkan bahwa tidak semua permintaan dapat dipenuhi. Prinsip inilah yang membuat Iqbal kecil tumbuh menjadi anak yang tidak manja. Bahkan dimata Iqbal, belajar dan mempersiapkan diri bukan sekedar rutinitas tetapi menjadi kebutuhan hidup. Wajarlah rasanya bila sejak duduk di bangku sekolah dasar, pria kelahiran Gunung Sugih, 6 Desember 1963 ini selalu mendapatkan sekolah terbaik di daerahnya.

Setelah lulus Sekolah Menengah Atas, anak ketiga dari enam bersaudara ini serius mempersiapkan diri melanjutkan pendidikan tinggi di Institut Teknologi Bandung dan Universitas Lampung. Tak pernah sedikitpun terlintas dipikiran lelaki yang bercita-cita menjadi insinyur Teknik Industri ini untuk melanjutkan pendidikan di sekolah kedinasan.

Berbekal informasi dari rekannya,

Iqbal mengetahui Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) sebagai satu instansi pendidikan kedinasan milik Kementerian Keuangan. Kala itu, temannya mengatakan bahwa proses seleksi di STAN sangat ketat. Jadilah Iqbal turut mendaftar di STAN karena tertantang untuk menaklukkan ujian masuk yang dikatakan amat sulit.

Saat pengumuman, tak disangka ternyata Iqbal diterima di seluruh perguruan tinggi yang dipilihnya, termasuk lulus di STAN. “Saya sebenarnya *dibebasin* (memilih) tapi karena masalah biaya, saya pilih STAN. Waktu saya ke Jakarta untuk ospek di STAN, saya juga dikasih duit untuk daftar ulang di ITB, kalau (tiba-tiba) berubah pikiran,” ceritanya.

Setelah menyelesaikan Diploma III spesialisasi akuntansi di STAN pada tahun 1985, Iqbal dihadapkan pada pilihan untuk bekerja sebagai auditor di BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) atau menjadi asisten dosen di STAN. Terbiasa mengajar serta memberikan *sharing* saat mengulang materi kuliah pada teman-temannya, akhirnya Iqbal lebih siap memilih menjadi asisten dosen di STAN.

Tiga tahun berselang, Iqbal pun kembali ke bangku kuliah. Ia meneruskan program Diploma IV akuntansi STAN sebagai persiapan bila ia ditugaskan menjadi auditor di BPKP. Namun kenyataannya, setelah lulus, lagi-lagi Iqbal tidak terpikir untuk menjadi auditor. “Kayaknya sudah panggilan hati. Saya memutuskan untuk terus jadi dosen meski perlu sekolah lagi,” ungkapnya.

Selanjutnya, pada tahun 1992, pria yang suka membaca literatur keuangan ini mendapatkan kesempatan meneruskan pendidikan pasca sarjana di Case Western Reserve University, Amerika Serikat. Kala itu, Iqbal memilih Master of Business

sebagai konsentrasinya hingga lulus di tahun 1994.

Kembali dari Amerika, Iqbal kembali ke almamaternya untuk membagi ilmu yang didapatnya kepada para mahasiswa dengan menjadi pengajar di STAN. Kemudian, sekitar tahun 2003, statusnya berubah menjadi fungsional widyaiswara (pengajar) di STAN. Lalu pada 2011, masih dengan status widyaiswara, Iqbal dipindahkan ke Pusdiklat Pengembangan SDM.

Pentingnya kompetensi

Selama menjadi tenaga pendidik di STAN, Iqbal selalu mempersiapkan agar mahasiswanya menjadi orang terpelajar. Menurutnya, seringkali motivasi terbesar mahasiswa bukan belajar tetapi sekedar mendapat ijazah. Jika hal itu yang terjadi, maka mereka tidak akan menjadi *educated people*. “Sukses atau tidaknya seseorang pada kehidupan berikutnya sangat tergantung dari perubahan *mindset*. Salah satu ciri *educated people* ialah orang yang terus belajar walaupun sudah lulus,” terangnya.

Selain bekal dari pendidikan akademis, Iqbal memandang bahwa hal penting yang harus dipersiapkan mahasiswa sebelum mereka turun ke dunia kerja ialah kompetensi. Kompetensi terdiri atas tiga unsur, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Bila mereka tidak memiliki kompetensi, maka mereka bisa menjadi orang yang tidak mau bekerja. Kalaupun mereka mau bekerja, tak menutup kemungkinan mereka hanya menjadi *trouble maker* di tempat mereka bekerja.

Di samping kompetensi, hal lain yang dipersiapkan Iqbal kepada mahasiswanya ialah menghindari sikap *money oriented* dalam bekerja. “Tantangan di STAN karena lulusannya menjadi pegawai negeri sehingga membutuhkan orang-orang yang merah putih (berintegritas). Kalau

orientasinya uang (mencari keuntungan untuk diri sendiri) akan berat. Tidak berintegritas. Bisa berbahaya bagi Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan negara,” kata Iqbal.

Selain mempersiapkan bekal bagi para mahasiswanya, Iqbal juga mempersiapkan diri sebagai pendidik yang tidak sekedar mentransfer ilmu. “Sebagai pendidik, dosen, widyaiswara, tugas yang paling *challenging* ialah dia harus mampu menginspirasi peserta didiknya.” Kata ‘inspirasi’ ini dimaknai Iqbal seperti memberi kail bukan memberi umpan kepada mahasiswa sehingga setelah dosen mentransfer ilmunya maka proses pembelajaran tidak akan berhenti sampai disitu. Justru para mahasiswa akan mencari sumber ilmu lain untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan mereka.

Bermain analogi

Ketika mengajar di STAN, Iqbal lebih banyak berkutat dengan kompetensi *hard skill*. Lain halnya, saat ia ditempatkan sebagai widyaiswara pada Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM), “tiga tahun saya belajar hal baru dan praktek baru. Saya belajar dan terus memperdalam *soft skill*,” ujarinya.

Iqbal menganalogikan widyaiswara seperti pelatih olah raga. “Juara dunia bulutangkis yang sudah top saja tetap punya pelatih. Kenapa? Seringkali ada *blind spot*, kita tidak tau tapi orang lain tahu, salah satunya ialah kelemahan. Jadi, kelemahan itu gampang dilihat oleh orang lain. Kita (widyaiswara) bisa menempatkan diri sebagai *coach*, (karena) kita bisa tau kurangnya dimana,” tambahnya.

Kemudian, Iqbal tidak hanya memberikan teori semata tetapi ia berupaya menyesuaikan teori tersebut di dunia kerja. Lalu, ia menganalisisnya,

apakah teori tersebut masih relevan atau tidak relevan bila diterapkan di lapangan. Meskipun demikian, pada akhirnya, apakah hasil analisis tersebut akan diimplementasikan atau tidak bukan lagi menjadi kewenangannya selaku widyaiswara.

Selang beberapa tahun, Iqbal diangkat sebagai Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Saat itulah, suami dari Kun Ganesti Ekasari ini mempersiapkan desain materi diklat yang berbeda. Bila materi ajar di STAN relatif tetap dari tahun ke tahun, berbeda dengan materi ajar di Pusdiklat yang kurikulumnya terus berubah menyesuaikan kebutuhan *user*.

“Belakangan ini Kementerian Keuangan menghadapi tantangan baru sehingga membutuhkan kompetensi berbeda. Diklat-diklat yang dulu disusun seperti makan di restoran cepat saji (tinggal memilih menu diklat) dianggap tidak cukup lagi. (Sehingga) Kita harus siapkan diklat sesuai kebutuhan organisasi, seperti makan dengan menu yang disiapkan *chef*, Anda mau makan apa nanti kita ramu,” jelasnya.

Iqbal menuturkan salah satu perbedaannya ialah *exercise*. Ketika diklat, latihan soal dibuat lebih banyak dan disesuaikan dengan kasus yang benar-benar terjadi. Hal ini berguna bagi peserta diklat agar mereka nantinya diharapkan mampu mengimplementasikan ke dalam tugasnya. Dengan kata lain, tatarannya untuk meningkatkan kompetensi, tidak hanya *knowledge* tetapi juga *skills* dan perilaku.

“Artinya kita memastikan hasil diklat ini ialah manusia-manusia pembelajar yang akan mampu membangun. Menjadikan organisasinya (unitnya) sebagai *learning organization* sehingga mampu menjawab tantangan baru yang akan mempunyai kinerja tinggi,” tutur

Iqbal.

Selain memberikan diklat untuk Kementerian Keuangan, Iqbal juga tak menutup kerja sama dengan Kementerian/Lembaga lain. Ini karena Kementerian Keuangan juga mempunyai tanggung jawab untuk mempersiapkan SDM pengelola keuangan negara yang baik di seluruh Kementerian/Lembaga. Terbukti, ketika Iqbal baru bergabung dengan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, permintaan diklat mencapai sekitar 80 program dari 20 Kementerian/Lembaga.

Value

Memiliki seorang anak yang mengalami autisme, membuat ayah dari Faisal Yusuf Islami dan Furqon Shalahuddin Islami ini sadar bahwa inilah Tuhan mempersiapkan hal terbaik bagi dirinya. Keputusan sang istri melepas pekerjaannya saat kelahiran anak pertama seolah tepat untuk merawat dan mendidik kedua buah hatinya.

“Saya diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk membesarkan anak autisme. Akibatnya, saya lebih berempati pada orang-orang yang kurang cepat menerima materi waktu belajar. Anak saya untuk hal yang dia tidak suka, belajarnya susah tapi apabila dia *interest* tanpa perlu diajari, dia bisa sendiri. Begitu pun mahasiswa, kalau tidak ada *interest* ingin maju, daya juangnya kurang, itu yang sering saya *share*,” paparnya.

Ke depan, lelaki yang hobi main pingpong dan bersepeda ini tidak menargetkan sesuatu yang spesifik, seperti jabatan karir maupun hidupnya. Baginya, jabatan sekadar amanah. “Yang saya lakukan adalah memastikan bahwa saya selalu *continous improvement*, mengisi hal-hal baru sehingga saya akan selalu siap kalau ada penugasan baru,” ungkapnya.

Teks lin Kurniati

Ekonomi Diprediksi Membaik di Kuartal Berikutnya

Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis realisasi pertumbuhan ekonomi makro pada triwulan I tahun 2016 sebesar 4,92 persen. Meskipun masih lebih rendah dari capaian pada triulan IV tahun 2015 yang sebesar 5,04 persen, hasil ini lebih tinggi jika dibandingkan secara *year on year*. Pada periode yang sama tahun lalu, pertumbuhan ekonomi tercatat hanya 4,73 persen.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara meyakini pertumbuhan ekonomi bisa membaik pada kuartal-kuartal berikutnya. “Pemerintah meyakini pertumbuhan ekonomi tahun ini berada di kisaran 5,3 persen. Sementara untuk inflasi terkendali, berada di kisaran empat persen,” kata Suahasil saat membuka Workshop Forum Ekonom Kementerian Keuangan (FEKK) pada Rabu (18/5) di Jakarta.

Salah satu faktor yang akan menopang pertumbuhan ekonomi tahun ini, Suahasil menambahkan, adalah menajanknya belanja modal Indonesia. Hingga April 2016, belanja modal Indonesia tercatat telah mencapai Rp18 triliun, meningkat dua kali lipat jika dibandingkan tahun sebelumnya, sebesar Rp9 triliun. “Kenaikan belanja modal karena pralelang 2016 sudah dapat dilaksanakan pada November hingga

Desember 2015. Ini mempercepat eksekusi (program dan anggaran),” ujar Suahasil.

Dari faktor eksternal, terdapat dua isu yang diperkirakan dapat memengaruhi perekonomian Indonesia dengan dampak berbeda. Yang pertama adalah penurunan pertumbuhan ekonomi Tiongkok, dengan dampak antara lain pada penurunan ekspor kita. Sementara faktor kedua adalah potensi kenaikan rating Indonesia ke level *investment grade* dari Lembaga Peringkat Internasional Standard and Poor’s (S&P) Global Ratings dengan dampak meningkatnya aliran dana investasi.

Peluang kenaikan peringkat ini disampaikan Director Sovereign and International Public Finance Ratings S&P Kyran Curry saat bertemu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, Rabu (11/5). Hasil penilaian S&P terhadap Indonesia akan diumumkan pada Juni mendatang. “Itu menjadi bagian dari agenda tahunan kami,” ujar Kyran kepada wartawan.

Sudah diprediksi

Dalam wawancara dengan Media Keuangan awal Mei, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan bahwa pelemahan ekonomi Tiongkok telah dideteksi sejak tahun lalu. Indikasinya terlihat dari pertumbuhan

ekspor yang negatif, apalagi karena ekspor kita, terutama komoditas, selama ini sebagian besar ke negeri Tirai Bambu. “Dengan pelemahan ekonomi Tiongkok, mau tidak mau kita harus mencari substitusi kinerja ekspor yang turun. Kita perlu berfokus pada investasi, termasuk investasi di sektor infrastruktur, manufaktur, dan jasa,” kata Menkeu.

Di samping itu, untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah memastikan tidak ada kenaikan harga bahan pokok yang berlebihan. Pemerintah juga berkomitmen untuk membuat pengeluaran pemerintah yang lebih besar, cepat, dan terarah. “Saya pikir kalau kita melakukan ini ya kita bisa lah paling tidak memitigasi dampak negatif dari pelemahan ekonomi Tiongkok,” ujar Menkeu.

Ditemui di sela-sela penyelenggaraan Workshop FEKK, Mansur Afifi, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, mengatakan bahwa dampak kebijakan tender program-program pembangunan dalam APBN 2016 yang telah dimulai sejak akhir tahun lalu dan awal tahun ini telah dapat mulai dirasakan. “Meskipun konsumsi rumah tangga pada triwulan I mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu, Pembentukan Modal Bruto Tetap (PMTB) bisa meningkat,” kata Mansur.



Sektor riil berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi di kuartal berikutnya.

Menurutnya, penurunan konsumsi masyarakat disebabkan belanja bantuan sosial yang menurun drastis pada APBN. Secara umum, Mansur menilai perekonomian dalam negeri saat ini masih berada di jalur yang benar.

Kebijakan antisipatif

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I yang belum terlalu tinggi dianggap wajar oleh Hera Susanti, Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia karena pelaksanaan anggaran membutuhkan proses. Hera memberikan apresiasi terhadap capaian realisasi pertumbuhan kuartal pertama, apalagi jika melihat komposisi pengeluaran yang didorong oleh PMTB.

Komposisi realisasi PMTB pada triwulan I menunjukkan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait reformasi fiskal dan struktural, misalnya melalui berbagai paket ekonomi, telah dirasakan dampaknya. Hera menilai terdapat beberapa kebijakan antisipatif yang dapat dipertimbangkan pemerintah. Selain memperkuat perekonomian domestik, Hera memandang pemerintah

perlu memperluas hubungan perekonomian dengan negara lain, agar tidak tergantung pada beberapa negara tertentu. “Dalam jangka panjang, kesiapan institusi, termasuk regulasi, infrastruktur fisik dan sosial, serta pengembangan kualitas SDM perlu terus dikembangkan agar dapat bersaing dan berkontribusi lebih dalam upaya pembangunan negara,” kata Hera.

Pendapat senada disampaikan Bernadette Rabbiani, Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sriwijaya. Pemerintah diharapkan dapat melanjutkan reformasi struktural terutama untuk meningkatkan daya saing ekonomi. “Dengan demikian, investasi akan masuk dan daya saing ekspor membaik,” ujar Bernadette.

Selain itu, pemerintah dinilai perlu melakukan diversifikasi negara tujuan ekspor di luar yang selama ini, terutama negara-negara *emerging market*. “Identifikasi kebutuhan barang dan komoditas yang diperlukan negara berkembang dan Afrika memang perlu kerja keras dan terobosan baru. Bukan *business as usual*,” tutur Bernadette.

Foto Gathot S.

Selama ini, banyak komoditi mentah dan setengah jadi dari Indonesia yang diimpor oleh Tiongkok untuk diolah lagi. “Banyak produk jadinya yang kita impor dari mereka,” lanjutnya.

Peringkat *investment grade*

Baik Mansur, Hera maupun Bernadette sepakat bahwa potensi peningkatan level *investment grade* dari S&P berdampak positif terhadap perekonomian. “Pemberian peringkat oleh S&P menandakan kondisi ekonomi kita sudah *on the right track*,” kata Mansur. Berbagai kebijakan baik di sektor fiskal dan moneter menjadi landasan fundamental bagi ekonomi untuk tumbuh lebih progresif. “Jika kita menerbitkan obligasi sekarang ini, akan sangat menarik di mata investor,” ujarnya lagi.

Sementara menurut Hera, peningkatan pemeringkatan investasi dapat meningkatkan reputasi negara. Dampak ini akan lebih besar jika dilakukan oleh lembaga pemeringkat yang cukup berpengaruh seperti S&P. “Peringkat yang meningkat merupakan sinyal bagi para investor bahwa perekonomian Indonesia sudah membaik, resiko yang dihadapi oleh investor relatif berkurang, dan iklim investasi menjadi lebih baik,” kata Hera.

Bernadette menambahkan bahwa pemeringkatan S&P dapat meningkatkan kepercayaan pasar internasional, sehingga dapat meningkatkan investasi. Selain itu, pemeringkatan yang membaik juga dipandang mampu mendorong penurunan suku bunga atau biaya bunga untuk surat utang yang dikeluarkan pemerintah, sehingga berdampak positif APBN. “Ini bagus untuk perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global,” ujarnya.



Handry Imansyah
Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lambung Mangkurat

"Saya kira hasil pertumbuhan triwulan I yang tidak terlalu tinggi adalah hal biasa. Pada awal tahun, belanja pemerintah, baik di pusat maupun daerah belum berjalan baik. Dampak belanja tersebut belum cukup kuat mendorong kegiatan ekonomi. Hal ini biasanya menjadi bagian dari siklus triwulanan. Namun, saya yakin triwulan berikutnya pertumbuhan ekonomi akan meningkat lebih tinggi lagi di tengah tekanan penerimaan pemerintah yang kurang menjanjikan. Tax amnesty, jika bisa diundangkan lebih cepat, akan menjadi penambah penerimaan."

Kondisi Tiongkok memang perlu diwaspadai karena telah menjadi mitra dagang yang penting. Peran ekspor ke Tiongkok sudah hampir menyamai Jepang dan Amerika Serikat. Kontribusi ekspor ke sana sudah mencapai sepuluh persen hingga April. Namun, jangan dikhawatirkan karena hanya sepuluh persen dari keseluruhan ekspor Indonesia. Lagipula, ekspor nonmigas ke sana masih didominasi oleh batubara, sedangkan batubara memang sudah lama tertekan. Jadi perkembangan ekonomi Tiongkok memang perlu diwaspadai, tetapi tidak perlu terlalu dikhawatirkan."



Candra Fajri Ananda
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Brawijaya

"Jika hasil pertumbuhan ekonomi triwulan I dilihat dari struktur Produk Domestik Bruto menurut kelompok pengeluaran, proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga masih memegang kendali tertinggi. Kontribusinya mencapai 56,86 persen. Posisi ini mengindikasikan bagaimana pentingnya menjaga variabel-variabel pendapatan masyarakat agar tingkat pengeluaran, terutama konsumsi rumah tangga sebagai determinannya, tetap terjaga."

Pemerintah dapat berperan aktif di dalamnya dengan mengalokasikan belanja-belanja yang berkualitas untuk menunjang peningkatan produktivitas dan pemerataan pendapatan masyarakat. Berangkat dari pengalaman pembangunan sebelumnya, dengan adanya barrier dalam kapasitas belanja kebutuhan publik, pemerintah perlu menetapkan prioritas pembangunan terutama untuk belanja infrastruktur transportasi, ketersediaan energi, fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta berbagai jenis subsidi yang bersifat sebagai stimulus daya beli masyarakat."



Nury Effendi
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Padjajaran

"Saya menyebut hasil pertumbuhan ekonomi pada triwulan I tahun 2016 sebagai optimisme terbatas. Pemerintah selama ini telah mengupayakan berbagai kebijakan ekonomi yang baik dan benar, hanya memang kondisi eksternal membatasi optimalisasi dampaknya. Salah satu yang menarik dan sejalan dengan nafas Sidang Tahunan Islamic Development Bank di Jakarta adalah masalah pertumbuhan yang inklusif."

Pemerintah telah melakukan berbagai hal untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif. Tinggal kita lihat, ukur, dan kaji efektivitasnya. Yang juga penting adalah tren dari pertumbuhan inklusif ini. Dalam kaitan dengan ini, pertumbuhan yang tinggi bukan yang utama dan segalanya."

Teks Dwinanda Ardhi

Budget Learning Center



Budget Learning Center (BLC) adalah sebuah sarana pembelajaran, inovasi Direktorat Jenderal Anggaran untuk memberikan informasi mendalam atas topik-topik penganggaran kepada Kementerian/Lembaga (K/L) serta Pemerintah Daerah (Pemda).

Pelaksanaan BLC terbagi dalam kelas-kelas tematik yang semakin memudahkan peserta untuk berinteraksi dan berkomunikasi dalam meningkatkan kapabilitas K/L dan Pemda dalam proses penganggaran.

Direktorat Jenderal Anggaran

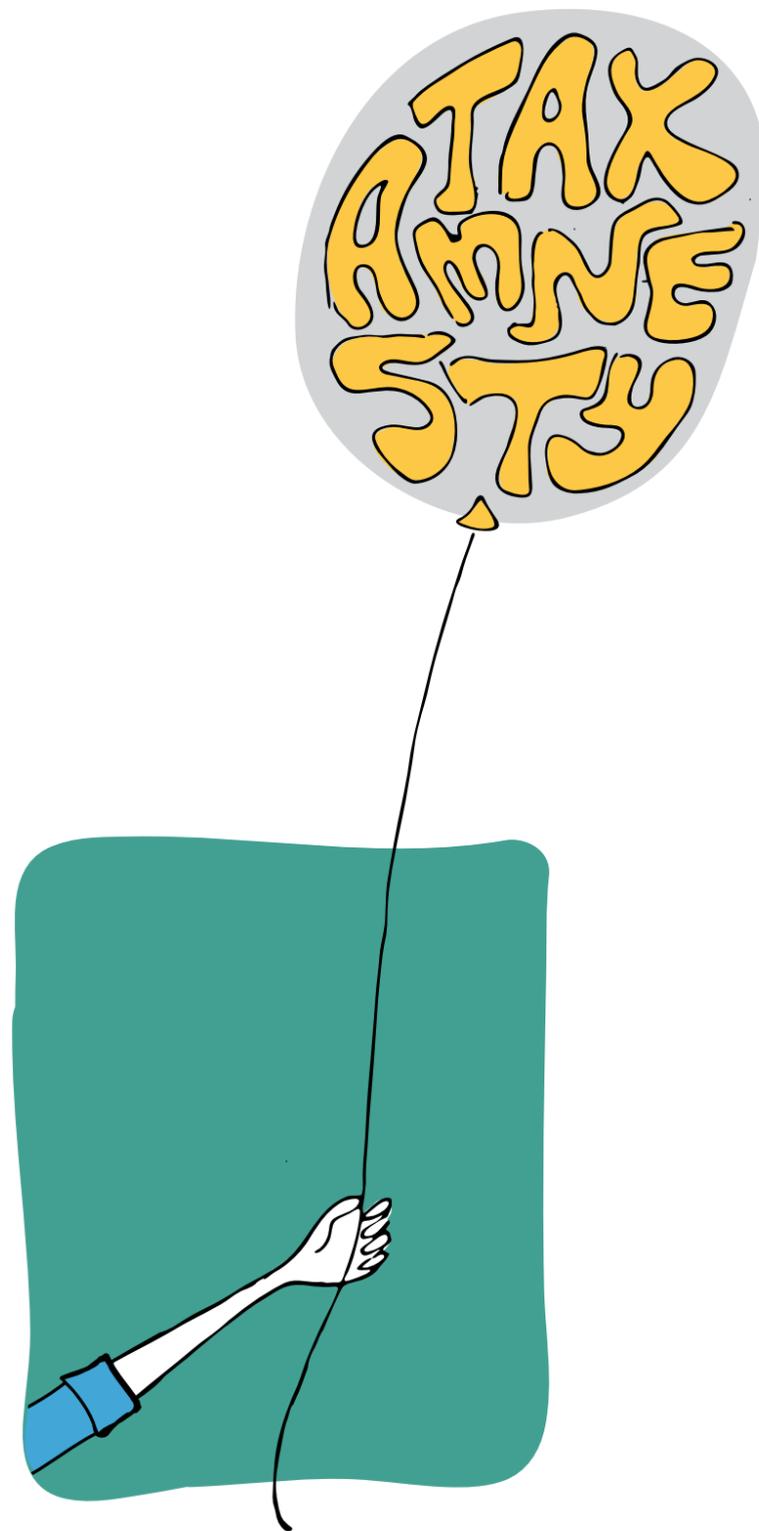
Jl. Dr. Wahidin No.1 Gedung Sutikno Slamet Lt.4
Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, 10710
Telp: 021-34357164

website.

<http://www.anggaran.depkeu.go.id/>



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN



Ilustrasi
Arfindo Briyan

Masihkah Berharap Pada Tax Amnesty?

Teks Candra Fajri Ananda, Dekan dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

Dalam dokumen *panama papers*, terdapat 214 ribu nama pengusaha/perusahaan yang terekam, sebanyak 2.961 nama berasal dari Indonesia. Isu dokumen tersebut, tentu memiliki dampak serius pada Rancangan Undang-Undang (RUU) *tax amnesty* yang masih mengundang pro dan kontra yang panjang. Dinamika kebijakan ini perlu dieksplorasi secara *fair* untuk menangkai berbagai argumen miring tentang kebijakan *tax amnesty*.

Pihak yang masih belum bersepakat pada umumnya karena menganggap tendensi politik lebih tampak daripada kemurnian kepentingan ekonomi. Apalagi, tarif untuk memperoleh amnesti terbilang lebih murah jika dibandingkan dengan nominal pembayaran pajak yang dibayarkan secara normal. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ade Komarudin, tampil secara diplomatis menjelaskan bahwa kolega-koleganya di DPR tidak menolak secara vulgar pemberlakuan *tax amnesty*. Hal-hal yang masih menjadi pergunjingan internal DPR hanya seputar mekanisme pengelolaannya dan persentase pungutan yang dianggap masih relatif kecil.

Indonesia perlu belajar dari berbagai negara yang berpengalaman mengelola mekanisme yang tepat agar pengelolaan pengampunan pajak tidak menjadi salah

kaprah. Pengamat perpajakan, Yustinus Prastowo, turut mengingatkan agar Indonesia belajar dari 40 negara yang sudah menerapkan, tetapi rata-rata gagal dalam melaksanakan program *tax amnesty*. Contoh yang terdekat adalah kegagalan Filipina karena mekanisme lanjutan pasca pemberlakuan *tax amnesty* tidak diikuti reformasi sistem perpajakan yang baik. Walaupun demikian, pemerintah tidak harus turun semangat dan menganulir niatnya untuk menerapkan target repatriasi karena di antara 40 negara yang sudah menerapkan, terselip cerita negara yang sukses menjalankan yakni di antaranya Afrika Selatan (Afsel) dan India.

Afsel pada tahun 2003 tercatat sukses mengumpulkan dana repatriasi sebesar USD0,36 miliar dari pengampunan pajak yang berlaku selama 6 bulan. Dana hasil repatriasi di India pada tahun 1981 bahkan mampu dicapai dengan jumlah yang lebih besar, yakni senilai USD1 miliar yang dilakukan selama 3 bulan. Baik Afsel maupun India bersepakat untuk melepaskan pengemplang pajak dari sanksi administrasi lainnya selama hak amnesti belum kadaluarsa untuk dapat digunakan. Kedua negara dapat terbilang sukses memenuhi tujuannya untuk meningkatkan kantong anggaran pembangunan melalui pengampunan pajak.

Jika pemerintah masih tetap *keukeuh* hendak menerapkan *tax amnesty*, maka mekanisme pengelolaan akan menjadi persoalan penting di dalamnya. Pemerintah bisa meniru langkah dari Mantan Pemimpin Afsel, Nelson Mandela, yang melakukan intelegen ekonomi dan rekonsiliasi politik sebelum penerapan serta memberikan garansi *revenue tax reform*. Italia, yang mirip dengan Indonesia, khususnya dari banyaknya sektor ekonomi informal, melakukan *voluntary disclosure* sebelum kembali mengadakan *tax amnesty*. Ketiga negara ini bisa menjadi rujukan karena berbagai kesamaan dalam struktur politik dan ekonominya.

Gubernur Bank Indonesia (BI) menyampaikan lima kunci kebijakan yang perlu dilakukan untuk menyukseskan tujuan *tax amnesty*. Pertama, *tax amnesty* harus dirancang sebagai titik tolak dari sistem perpajakan yang baru melalui rekonsiliasi data sebagai bagian dari *tax reform*. Kedua, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus memiliki data akurat dan membangun administrasi perpajakan yang kuat dan efektif. Wajib pajak yang mendapat amnesti harus dipantau secara ketat, dipersiapkan audit serta dikenakan sanksi yang lebih berat jika mereka mengabaikan kesempatan untuk diamnesti. Ketiga, kebijakan ini harus bersifat mengikat bagi

semua yang mengajukan pengampunan pajak dengan pelaksanaan yang jelas. Keempat, pengampunan pajak seharusnya dilakukan secara cepat dengan durasi yang sangat singkat, yakni maksimal setahun. Kelima, kebijakan ini harus diikuti dengan penindakan hukum yang tegas untuk menjamin efektivitas pengampunan yang akan diberikan.

Pihak publik juga sudah mulai menanyakan, akan dibawa kemanakah dana-dana hasil repatriasi tersebut? BI sudah mulai mewanti-wanti bahwa kita masih memiliki keterbatasan pada instrumen keuangan untuk menangani *capital inflow* yang mengalir cukup deras, salah satunya berasal dari repatriasi dana *tax amnesty*. Jika tidak diantisipasi dengan baik, maka hal itu berpotensi mengganggu stabilitas makro ekonomi dan pasar keuangan domestik. Sembari menunggu agar institusi perbankan menjadi lebih sehat, beberapa alternatif kebijakan juga sudah banyak dipaparkan, misalnya dengan mengalirkan dana-dana tersebut untuk perbaikan kredit modal sektor riil serta pengembangan iklim investasi dan infrastruktur, yang banyak menyokong *employment creation*. Pengelola Reksadana juga sudah mulai menawarkan jasanya dan bersedia membantu pemerintah mengelola dana-dana repatriasi. Sektor-sektor tersebut terbukti banyak mendorong perkembangan faktor-faktor fundamental makroekonomi di Indonesia, sehingga sangat layak untuk mendapat prioritas seiring dengan potensi kenaikan pendapatan di dalam negeri.

Tax Avoidance dan Keseimbangan APBN

Jika *tax amnesty* nantinya tidak mampu mencukupi perkiraan defisit penerimaan dari pajak, maka pemerintah

sewajarnya mulai menggeser titik fokusnya agar Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016 tidak terombang-ambing. Presiden telah menyetujui untuk mengurangi belanja Kementerian/ Lembaga (K/L) sekitar 50 triliun, untuk berjaga-jaga seandainya RUU *Tax amnesty* gagal disepakati. Untuk itu, reformasi perpajakan yang jelas arahnya sangat diperlukan, untuk mampu mengantisipasi dinamika perekonomian jika *capital inflow* meningkat drastis dan dana di perbankan melonjak. Perbaikan pada sistem teknologi informasi, penguatan pengendalian internal, perbaikan insentif dan sanksi (*reward and punishment*) bagi Sumber Daya Manusia (SDM) harus mampu menjawab problematika diatas.

Berbagai opini untuk menjawab problematika *tax amnesty* cukup santer. Misalnya, perlunya rekonsiliasi politik antara pemerintah dan masyarakat selaku pemegang wajib pajak yang bertujuan untuk meningkatkan modal sosial. Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani, menyampaikan bahwa terdapat kontrak sosial yang lemah antara wajib pajak dengan level kepatuhan pemenuhan pajak. Dampak dari *Panama Papers* seharusnya menjadi tonggak reformasi lanjutan untuk mempromosikan tata kelola pemerintahan yang semakin prima dan memperkuat kepercayaan publik (terutama berkaitan dengan tujuan investasi dan perluasan lapangan pekerjaan).

Selanjutnya, target penerimaan pajak perlu direvisi untuk menghindari jebakan psikologis. Pada era Presiden Jokowi, target kenaikan penerimaan pajak terkesan ambisius. Sehingga, tanpa adanya berbagai gebrakan-gebrakan konstruktif melalui reformasi

perpajakan dan pertimbangan kondisi pertumbuhan ekonomi yang alamiah, kinerja perpajakan kita akan selalu dianggap *pepesan kosong*. Apalagi berkembang dugaan bahwa penerimaan pajak di penghujung tahun 2015 yang melonjak signifikan sebagian besar merupakan hasil pengalihan penerimaan yang seharusnya diterima tahun 2016. Untuk mencegah opini tersebut, realisasi penerimaan pajak tahun ini harus lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Kemudian, jika penerimaan pajak pada tahun ini sudah diperkirakan tidak memenuhi target, maka demi menjaga tingkat defisit APBN, pemerintah harus berani membuat alokasi belanja yang lebih efisien. Misalnya, mengoreksi ulang pos belanja yang bersifat tumpang-tindih (*overlapping*), atau menekan jumlah program dan kegiatan yang sekiranya tidak banyak menunjang visi misi pembangunan yang ditetapkan Presiden Jokowi. Posisi ini akan lebih banyak dibebankan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas yang dituntut untuk mampu mensinkronisasi ulang program-program agar tidak tumpang tindih.

Terakhir, instrumen *Public-Private Partnership* (PPP) dan obligasi seharusnya menjadi pilihan alternatif utama untuk menutupi defisit pembiayaan. Jika pemerintah memang sangat yakin dengan kinerja dan prospek perekonomian Indonesia di masa mendatang, alangkah baiknya jika posisi ini dimanfaatkan untuk mempromosikan komponen PPP dan obligasi, yang lebih menjanjikan dari sekadar jalan pintas melalui utang luar negeri (bilateral dan multilateral) yang belum terbukti bebas dari tendensi kepentingan luar negeri terhadap kebijakan-kebijakan politik di Indonesia.

*) Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja.

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGADAAN LANGSUNG SIMPeL

Simpel aplikasinya besar manfaatnya

SIMPeL merupakan sistem yang dibangun untuk memfasilitasi proses pengadaan langsung secara elektronik dan mengelola database hasil pengadaan langsung, dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan *spending analysis*, analisa standard biaya, laporan pelaksanaan pengadaan langsung, serta laporan manajerial lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Aplikasi SIMPeL mencakup beberapa fitur, yaitu:

- Fitur pengelolaan referensi/database barang
- Fitur pengelolaan referensi/database penyedia dan klasifikasi bidang usaha
- Fitur pencatatan pembelian
- Fitur pengadaan langsung dengan SPK
- Fitur pengumuman BA Hasil Pengadaan Langsung dan advanced search hasil pengadaan langsung

Fitur tersebut di atas akan terus kami kembangkan sesuai dengan kebutuhan dan regulasi yang berlaku.



1200 jumlah penyedia terdaftar*

3.0 versi terbaru. Sebuah penyempurnaan

Terdapat pilihan tarif PPN, yaitu 10% dan pajak tidak dipungut.	Terdapat tombol edit dan hapus per item barang/ jasa
Bisa dilakukan oleh Pejabat Pengadaan sebelum menginput hasil evaluasi	Evaluasi administrasi dan kualifikasi dipisah
Kolom negosiasi harga sudah terisi harga penawaran penyedia, sehingga tinggal mengedit item harga barang/ jasa yang dinegosiasi	Hanya mensyaratkan pajak tahun terakhir (SPT Tahunan)

*terus bertambah

Helpdesk LPSE Kementerian Keuangan

Jl. Dr. Wahidin No.1 Gedung Djuanda I, Lt.1
Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, 10710

email.

lpse@kemenkeu.go.id

website.

http://www.simpel.lpse.kemenkeu.go.id/

Call Center
021 2922 5922



KEMENTERIAN KEUANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL

Kembali Ke Rumah untuk Membangun Daerah

Demi mengenyam bangku kuliah, Dien Dien Awaliyah rela meninggalkan rumah. Perempuan kelahiran Parepare, 13 Mei 1990 itu berkelana hingga ke Yogyakarta untuk menamatkan pendidikan S1 di Jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Gajah Mada (UGM). Dengan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Dien-panggilan akrabnya—selanjutnya berhasil lulus Program Magister Pengelolaan Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi dari Institut Teknologi Bandung.

“Dari kecil, saya selalu diajarkan bahwa derajat keilmuan seseorang tidak diukur dari tinggi atau jauhnya dia sekolah,” ujar Dien membuka percakapan dengan Media Keuangan, belum lama ini. Setelah meraih gelar sarjana pada 2012, dia sebetulnya telah siap terjun di dunia kerja. “Nilai saya tidak terlalu jelek dan pengalaman organisasi sejak SMA juga lumayan,” lanjut Dien.

Adalah kenangan mengikuti kuliah kerja nyata (KKN) yang mengubah rencana hidup Dien. “Saya seperti tersadar bahwa ilmu yang saya pelajari selama ini belum lengkap,” kata dia. Sebagai mahasiswa teknik, Dien merasa dirinya terlalu terfokus pada urusan teknis dari sebuah proyek. Padahal,

kemampuan berinteraksi dengan masyarakat merupakan tantangan yang tak kalah penting. Dia merasa kesulitan dalam mengimplementasikan ilmu yang saya dapat di kampus. Di lapangan, hitung-hitungan di kepalanya buyar semua. “Kalah dengan pengalaman bertahun-tahun dari seorang bapak di daerah tempat saya KKN yang selama ini menjadi pengelola jaringan air minum,” ujar Dien.

Kenangan itu membantunya membulatkan tekad untuk mempelajari pemberdayaan masyarakat lebih lanjut. Bagi Dien, memahami teori saja tanpa mengetahui praktek yang baik dan benar tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Pada saat itu pilihan yang ada di kepalanya adalah melanjutkan pendidikan pada program magister terapan atau terlibat langsung dalam kegiatan yang melibatkan masyarakat. “Ternyata kesempatan yang pertama datang adalah melanjutkan S2,” kata Dien.

Bidang ilmu yang kompleks

Pengelolaan infrastruktur air bersih dan sanitasi merupakan bidang ilmu yang kini ditekuni Dien. Proyek penyediaan jaringan air minum di daerah tujuan KKN-nya menjadi pendorong, bukan hanya



Gedung A.A. Maramis II Lt. 2
Jl. Lap. Banteng Timur No. 1 Jakarta 10710
Telp/Faks. (021) 3846474
E-mail. lpdp@depkeu.go.id
Twitter/Instagram. @LPDP_RI
Facebook. LPDP Kementerian Keuangan RI
Youtube. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP RI

Foto
Dok. Pribadi

untuk mencari kampus yang memiliki kurikulum di bidang *water supply*, melainkan juga mata kuliah pembangunan berbasis masyarakat. Menurut Dien, pengelolaan air bersih dan sanitasi merupakan bidang ilmu yang kompleks. Program magister yang diambilnya adalah dengan gabungan dari ilmu teknik lingkungan, teknik sipil, dan penataan wilayah.

Sejak kecil, Dien mengaku menggemari pelajaran biologi. Dia selalu tertarik dengan air dan lingkungan. “Saat bermain di tengah hujan, saya mengamati aliran air sambil bertanya mengapa air mengalir lewat jalan raya, bukan lewat saluran drainase,” ujarnya mengenang. Saat mengambil jurusan Teknik Sipil, Dien sempat merasa tersesat. “Syukur *Alhamdulillah*, bidang teknik sipil luas. Akhirnya saya menemukan kembali jalan saya di bidang keairan terutama di bidang *water supply*,” kata Dien lagi.

Penerima beasiswa angkatan awal

Dien termasuk salah satu penerima beasiswa generasi pertama dari LPDP. Dia mengikuti Program Kepemimpinan (sekarang bernama Persiapan Keberangkatan) Batch 3. Dien masih ingat perjuangannya mendaftar program beasiswa LPDP. Saat itu, dia telah lulus



Dien saat mengikuti *summerschool* di Jerman.



Salah satu kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diikuti oleh Dien.

dari UGM dan kembali ke Parepare. “Saat itu, semua persyaratan sudah dipenuhi, kecuali sertifikat TOEFL yang sudah kadaluarsa,” kata dia. Jika di Jogja, mencari sertifikat TOEFL adalah urusan mudah, tak demikian di Pare-Pare. “Saya harus mencari lembaga bahasa yang mengadakan test TOEFL, survei lokasi, mencari tumpangan untuk menginap, dan mempelajari rute sarana transportasi publik di Makassar,” ujar Dien.

Perempuan yang menyelesaikan pendidikan di UGM dengan beasiswa dari Kementerian Agama itu mengaku tak sempat banyak belajar. “Apa yang bisa dijawab, saya jawab. Yang tidak saya tahu, ya sudah dijawab *ngawur*,” katanya seraya tergelak. Nasib baik berpihak pada Dien. Nilai TOEFL-nya memenuhi syarat yang diberikan LPDP.

Dari Parepare, Dien kembali ke tanah Jawa. Selama menempuh kuliah di Bandung, dia banyak bersyukur. Belajar di dalam negeri membuat Dien lebih mengerti karakter masyarakat lokal melalui studi kasus-studi kasus. “Kalau saya berkuliah di luar negeri, berarti saya harus belajar dua kali. Belajar karakter masyarakat di sana, lalu belajar menghadapi masyarakat di negeri sendiri sepulangnya nanti,” ujar Dien.

Membangun daerah

Di kota kelahirannya, Dien saat ini bekerja sebagai guru pengganti sekaligus tenaga admin di Pesantren DDI Lil Banat Parepare. Pesantren itu adalah tempatnya menuntut ilmu dari TK sampai Madrasah Aliyah (setingkat SMA). “Saya ingin membagikan motivasi kepada anak-anak untuk sekolah tinggi agar bisa pulang membangun daerah,” katanya.

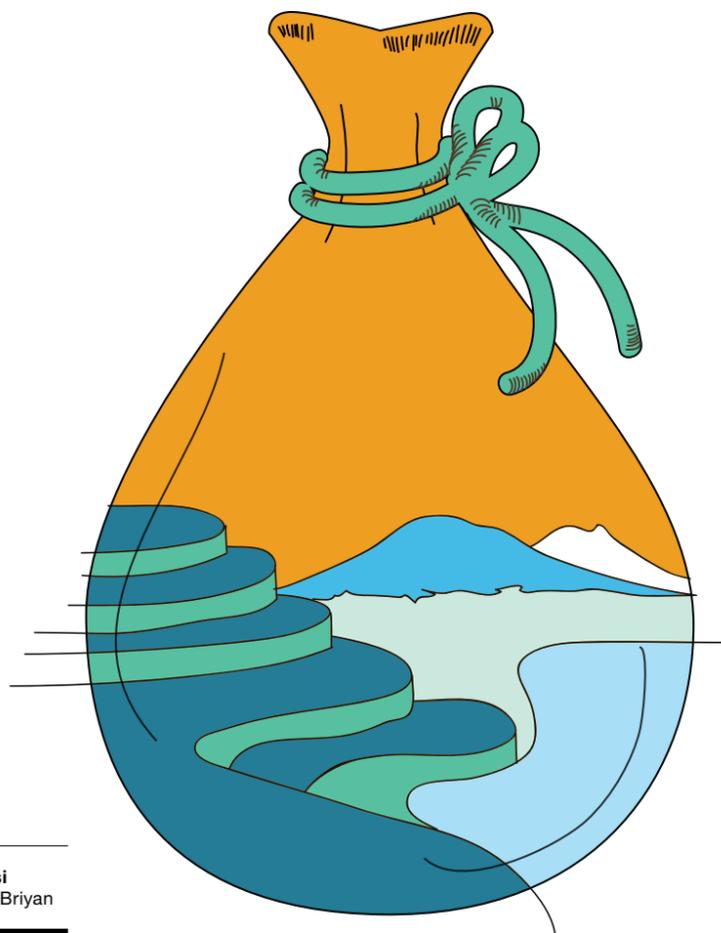
Menurut Dien, motivasi anak-anak di sana untuk melanjutkan sekolah sebenarnya tinggi. Namun, cita-cita itu sering pupus karena berbagai kesempatan dan kemudahan yang tak ada seperti di kota besar. “Saya selalu menekankan bahwa selama mereka memenuhi syarat, kesempatan bagi mereka terbuka sama lebar. Perjuangan yang keras akan membuahkan hasil setimpal,” ujar Dien.

Berbagai keterbatasan itu telah dialami sendiri oleh Dien. Namun, dia tak pernah menyerah hingga kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi datang padanya. Kini, Dien ingin sebanyak-banyaknya memberikan kontribusi dalam pemberdayaan masyarakat di daerahnya. Suatu hari nanti, dia berharap bisa mendirikan lembaga swadaya masyarakat yang menjalankan berbagai program pemberdayaan warga Parepare.

Teks Dwinanda Ardhi

Ekspansi Fiskal ke Desa Untuk Kesejahteraan

Teks Apri Prayoga, Mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN



Ilustrasi
Arfindo Briyan

Indonesia sejatinya merupakan kumpulan puluhan ribu desa dengan kultur yang beragam. Dari rangkaian nusantara itu pula tersebar potensi kekayaan alam yang belum dikelola secara optimal. Salah satu penyebabnya yaitu paradigma pembangunan yang menempatkan desa sebagai obyek yang tidak diberdayakan. Akibatnya, desa identik dengan kemiskinan dan keterbelakangan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di Indonesia per September 2014 mencapai 27,73 juta jiwa atau sekitar 10,96 persen dari total penduduk. Jika ditelisik lebih jauh, tingkat kemiskinan di desa jauh lebih tinggi dibandingkan di kota. Indeks Kedalaman Kemiskinan di kota 1,25, sementara di desa mencapai 2,24. Semakin tinggi nilai indeks ini artinya semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Data lain menunjukkan bahwa pada tahun 2014 penduduk desa yang hidup di bawah garis kemiskinan sebesar 13,8 persen, sedangkan penduduk kota berjumlah lebih kecil yaitu 8,2 persen.

Tak bisa dipungkiri kegiatan ekonomi lebih banyak terjadi di perkotaan mengingat aksesnya yang mudah, padatnya penduduk, dan ketersediaan sarana prasarana yang mendukung. Namun, tak menutup kemungkinan bahwa desa pun bisa berkembang dengan baik jika dikelola dengan benar dan disertai dukungan memadai dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat.

Saat ini terdapat 74.754 desa di Indonesia. Dari jumlah tersebut 39.091 daerah masuk kategori desa tertinggal dan 1.200 desa masuk kategori sangat tertinggal. Disamping itu, 15 ribu desa belum teraliri listrik, 117 kecamatan belum mempunyai Puskesmas, dan sekitar 11 desa belum mempunyai Sekolah Dasar. Fakta-fakta miris inilah yang mulai dibongkar dengan penerapan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Paradigma pembangunan berubah, dari membangun desa menjadi desa membangun.

Kini desa ditempatkan sebagai subjek pembangunan, yaitu pihak yang merencanakan, melaksanakan, dan menerima manfaat pembangunan. Pemerintah yang lebih tinggi bertugas memperkuat, memonitor, dan mengawasi. Desa diberikan kepercayaan penuh untuk mengelola anggaran desa sendiri, yang bersumber dari APBN dan dialokasikan dalam dana desa.

Pengalokasian anggaran dana desa akan dilakukan secara bertahap, yakni 3 persen di tahun 2015, 6 persen di tahun 2016, dan 10 persen di tahun 2017 dengan basis perhitungan dari anggaran transfer ke daerah. Dengan demikian, di tahun 2015 rata-rata setiap desa mendapatkan dana sebesar Rp280,3 juta, di tahun 2016 menjadi Rp628,5 juta per desa, dan mulai tahun 2017 penyaluran dana desa direncanakan memenuhi 10 persen dari dan di luar alokasi transfer ke daerah sehingga menyentuh Rp1 miliar per desa.

Kebijakan fiskal yang ekspansif ke pelosok desa ini mengemban misi

untuk membangun ekonomi dari daerah pinggiran sebagai upaya perwujudan nawacita. Fokus alokasi dana desa tahun 2016 yaitu pembangunan infrastruktur. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengungkapkan bahwa Dana Desa bisa menyerap jutaan tenaga kerja. Asumsinya jika 60 persen dari total dana desa tahun ini (Rp28,14 triliun) digunakan untuk infrastruktur, maka akan terbangun 24.500 km jalan desa, 16.800 unit jembatan, dan 4.900 km irigasi.

Sementara itu, sekitar 30 persen atau setara dengan Rp14,07 triliun dana desa akan digunakan untuk pengembangan ekonomi desa dan sisanya 10 persen atau Rp4,69 triliun disalurkan bagi pelayanan sosial dasar. Kontribusi dana desa terhadap penyerapan tenaga kerja di bidang pembangunan infrastruktur diprediksi mencapai 1,8 juta orang dan di bidang pengembangan ekonomi sebesar 457.280 orang, sehingga secara keseluruhan bisa mencapai 2,3 juta jiwa tenaga kerja yang terserap.

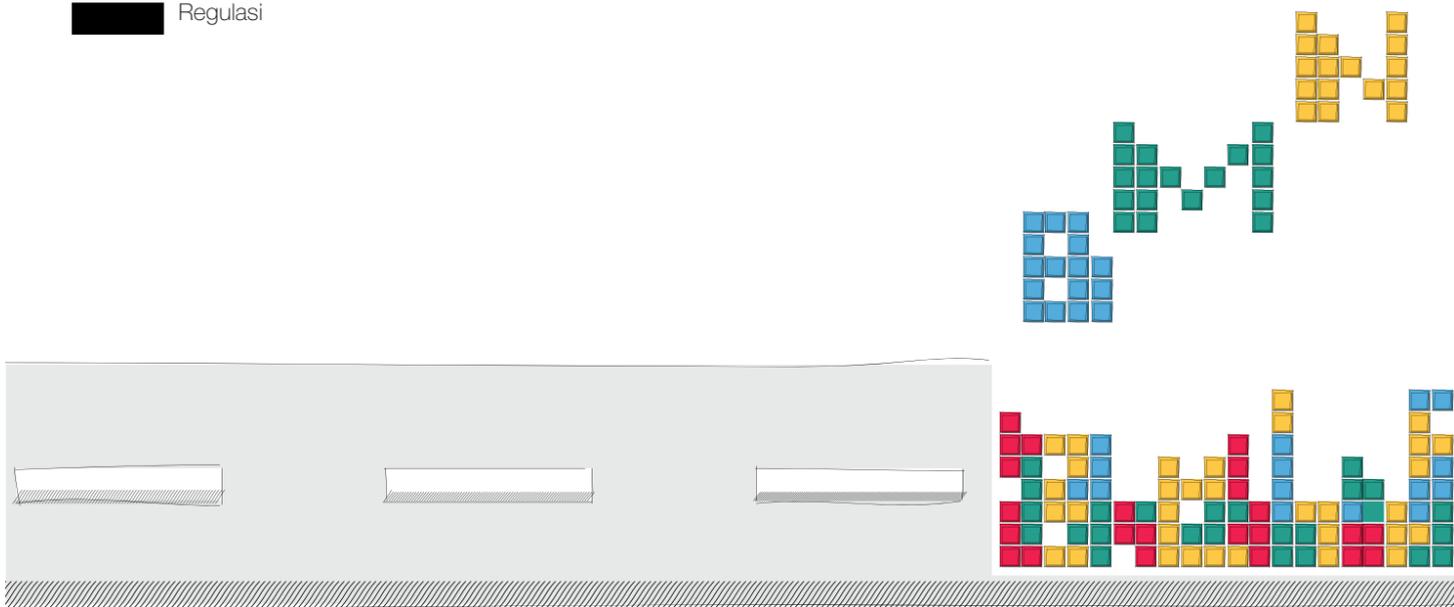
Jika menilik implementasi di tahun 2015, program dana desa terlihat cukup mendongkrak pembangunan. Walau masih menemui banyak kendala, namun dana desa telah mendorong terwujudnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) baru selain 2.000 BUMDesa yang telah ada. Selain itu, terdapat sekitar 6,7 persen desa yang mengalami peningkatan sarana dan prasarana produksi, 3,6 persen desa mengalami perbaikan kondisi pasar, dan

7,7 persen desa merasakan peningkatan modal masyarakat.

Di sisi lain, rata-rata penyerapan tenaga kerja sebagai kontribusi dana desa di bidang pembangunan fisik sebanyak 31 orang per desa dan tenaga kerja bidang administrasi sebanyak 5 orang per desa. Dengan demikian, total tenaga kerja yang berhasil diserap dari penggunaan dana desa pada tahun 2015 mencapai 2.657.916 orang. Dana desa 2015 juga berkontribusi positif terhadap upaya penanggulangan kemiskinan pada sebesar 66,9 persen desa dan menurunkan angka *gini ratio* dari 0,33 persen menjadi 0,27 persen. Pertumbuhan ekonomi di perdesaan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,5 persen.

Beragam data kuantitatif menunjukkan bahwa dana desa memperkuat daya tahan ekonomi bangsa, baik saat menghadapi goncangan krisis ekonomi global maupun ketika muncul kekhawatiran akan dampak kenaikan harga BBM di pertengahan tahun 2015. Perekonomian masyarakat di desa tetap berjalan baik karena ada dukungan dari dana desa yang menggerakkan aktivitas perekonomian desa.

Realisasi dana desa mencerminkan komitmen pemerintah untuk menggairahkan kembali kegiatan ekonomi di desa yang selama ini tenggelam. Dengan demikian, adanya berbagai *positive impact* dari dana desa tersebut dapat menjadi bukti bahwa penurunan angka kemiskinan, *Gini Ratio*, dan pertumbuhan ekonomi nasional dapat ditingkatkan melalui desa.



Pemanfaatan BMN Dorong Pembangunan Infrastruktur

Reviu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan BMN Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program prioritas pemerintah saat ini. Berbagai kebijakan pun diarahkan untuk mendukung upaya tersebut. Berdasarkan The Global Competitiveness Report 2015-2016 yang diterbitkan World Economic Forum (WEF), Indonesia menduduki peringkat ke-62 dari 140 negara dalam hal pembangunan infrastruktur. Posisi ini jauh tertinggal dibandingkan dengan Singapura (peringkat ke-2), Malaysia

(peringkat ke-24), dan Thailand (peringkat ke-44).

Salah satu upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan infrastruktur adalah melalui pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN). Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan BMN Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur, pemerintah mengatur mekanisme pemanfaatan BMN untuk penyediaan infrastruktur dalam bentuk sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).

Sejumlah kemudahan juga diatur dalam PMK tersebut. Sebagai contoh dalam mekanisme sewa, pembayaran dapat dilakukan secara bertahap. Sementara dalam mekanisme KSP, apabila mitra kerja sama merupakan BUMN/D, maka kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dimungkinkan untuk memperhitungkan faktor penyesuaian. Pada mekanisme KSPI, pembebanan pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) ditiadakan berdasarkan usulan dari Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK).

Pokok pengaturan dalam PMK 164 dimaksud telah sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Penyediaan Infrastruktur yang terakhir kali diubah dengan Perpres nomor 66 tahun 2013. Pada perkembangannya, Perpres tersebut telah dicabut dan diganti dengan Perpres nomor 38 tahun 2015.

Selanjutnya, guna menindaklanjuti Perpres nomor 38 tahun 2015 dan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur melalui pemanfaatan BMN, maka dilakukan penyempurnaan atas PMK nomor 164/PMK.06/2014 melalui penerbitan PMK nomor

65/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan BMN Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur.

Penetapan Mitra KSPI

Penetapan mitra KSPI dalam PMK nomor 65/PMK.06/2016, dilakukan berdasarkan hasil pengadaan Badan Usaha Pelaksana melalui pelelangan atau menunjuk langsung dari proyek kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang KPBU dalam penyediaan infrastruktur. Selanjutnya, terdapat beberapa pihak yang dapat bertindak sebagai penanggung jawab pemanfaatan BMN.

Pihak-pihak tersebut, yaitu menteri/pimpinan lembaga, kepala daerah, maupun BUMN/D yang membidangi penyediaan infrastruktur yang akan dikerjasamakan sesuai rekomendasi dari instansi terkait. Selain itu, dapat pula dari pihak lain yang ditunjuk sebagai PJPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama pemerintah dalam penyediaan infrastruktur.

Badan Hukum Asing Dapat Menjadi Mitra Kerja Sama

Sejumlah badan usaha yang dapat menjadi mitra dalam KSPI adalah Perseroan Terbatas (PT), BUMN/D, ataupun koperasi. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D. Sementara itu, mengacu pada Perpres nomor 38 tahun 2015, badan hukum asing termasuk sebagai pihak yang dapat mendirikan badan usaha pelaksana KPBU. Terkait hal ini, PMK nomor 65/PMK.06/2016 memperbolehkan badan hukum asing untuk bertindak sebagai

KSPI. Syaratnya, saat ditetapkan sebagai mitra pemanfaatan BMN KSPI, badan asing tersebut harus sudah merupakan PT berdasarkan hukum Indonesia.

Peniadaan Clawback Hingga Tahun 2020

Sebelumnya, pada PP nomor 27 tahun 2014 dikenal pembagian kelebihan keuntungan atau *clawback*. Pada perkembangannya, PMK nomor 164/PMK.06/2014 mengatur bahwa *clawback* dapat ditiadakan berdasarkan usulan PJPK. Terkait hal tersebut, guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, PMK nomor 65/PMK.06/2016 mengatur peniadaan pembebanan *clawback* melalui beberapa ketentuan yang salah satunya harus dapat dipenuhi.

Pertama, PJPK mengajukan peniadaan *clawback*. Kedua, PJPK tidak perlu mengajukan peniadaan *clawback* apabila permohonan KSPI diajukan oleh kementerian/lembaga selaku pengguna barang, atau oleh PJPK selaku penanggung jawab pemanfaatan BMN kepada pengelola barang sampai dengan 31 Desember 2020. Di samping itu, proyek dimaksud harus merupakan proyek pembangunan infrastruktur yang tercantum dalam daftar rencana KPBU, Perpres mengenai percepatan proyek strategis nasional, dan atau dokumen Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). Peniadaan *clawback* hanya dilakukan terhadap KSPI dengan jangka waktu paling lama 20 tahun.

Penambahan Ketentuan

Infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial, seperti jalan, air minum, energi, kesehatan, dan pendidikan, merupakan jenis

infrastruktur yang dapat dikerjasamakan. PMK nomor 65/PMK.06/2016 mengatur bahwa jenis infrastruktur untuk pemanfaatan BMN dalam penyediaan infrastruktur, baik dalam bentuk sewa maupun KSPI, mengikuti ketentuan dalam Perpres nomor 38 tahun 2015. Tidak hanya itu, PMK tersebut juga menambah ketentuan bahwa pemanfaatan BMN untuk penyediaan infrastruktur dapat merupakan gabungan dari dua jenis atau lebih infrastruktur.

Apabila melibatkan lebih dari satu pengguna barang PJPK, permohonan KSPI disampaikan secara tertulis oleh masing-masing pengguna barang kepada pengelola barang (Kementerian Keuangan) dengan tembusan kepada koordinator PJPK. Pihak yang menjadi koordinator PJPK merupakan kesepakatan menteri/kepala lembaga/kepala daerah yang memiliki kewenangan terhadap sektor infrastruktur yang akan dikerjasamakan.

Penutup

Penerbitan PMK nomor 65/PMK.06/2016 dilakukan dengan mempertimbangkan sinkronisasi terhadap ketentuan perundangan lain, sehingga regulasi menjadi faktor pendukung dalam pembangunan. Selain itu peningkatan peran pemanfaatan BMN untuk kepentingan dan kemanfaatan umum, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, sekaligus meningkatkan pelayanan umum lewat percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Sejumlah kemudahan yang diberikan pemerintah diharapkan dapat menarik minat berbagai pihak untuk turut serta dalam upaya membangun infrastruktur Indonesia.

Ilustrasi
Arfindo Briyan

Teks Purwito, Direktorat Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Meraih Puncak Mimpi di Nusantara

Foto
Dok. Pribadi

Leleh raga saat menggapai gunung Kerinci di Jambi pada 2015 lalu, tak menyurutkan semangat Patuan Handaka Pulungan untuk melanjutkan perjalanan. Masih ada enam puncak gunung tertinggi di Indonesia yang harus diraih. Tidak ada jeda untuk berlama-lama beristirahat. Perjalanan lain menantinya. Tantangan lima penjelajah itu sedang menunggu di depan mata.

Patuan, sapaan akrabnya, dipilih menjadi ketua tim ekspedisi Saptanusa yang digagas oleh Kelompok Pecinta Alam Stapala PKN STAN (Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara). Pendakian yang mengusung tema “7 Puncak untuk 7 Dekade” ini diadakan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70 pada tahun 2015. Patuan bersama keempat rekannya, yaitu Dimas Adi Saputra, Fiki

Hidayat, Sirojul Abrori, dan Meiliana Eka Inayati, menjadi penjelajah terpilih yang akan menaklukkan tujuh puncak gunung tertinggi di Indonesia.

Tak pernah terpikir dalam benak Patuan, bahwa ia akan menghabiskan 32 hari untuk mengunjungi puncak-puncak tertinggi di Indonesia. Pria kelahiran Batangtoru, 2 Oktober 1989 ini bahkan baru pertama kali mengenal dunia pendakian gunung saat di bangku kuliah. Semasa mengenyam pendidikan di SMA 2 Padang Sidempuan, Patuan lebih sering disibukkan dengan kegiatan sebagai Paskibra (Pasukan pengibar bendera). Tahun 2007 ia melanjutkan pendidikan sebagai mahasiswa STAN (sebelum berubah menjadi PKN STAN) jurusan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan.

Pendakian pertama yang berkesan

Saat memasuki tahun ketiga

perkuliahan, Patuan mengikuti pendakian bersama Stapala ke Gunung Gede, Bogor. Kesan pendakian pertama itu tak pernah lepas dari benaknya. Bagaimana sedang dimabuk asmara, ia pun jatuh cinta dengan suasana pegunungan. Uniknya, perasaan rindu mengunjungi gunung justru dirasakan setiba pulang ke rumah. “Saat perjalanan justru saya menggerutu sendiri. *Ngapain sih capek-capek naik gunung, kehujanan dan kena lumpur,*” tuturnya sembari tertawa.

Tahun 2014 Patuan mendapat kesempatan melanjutkan studi program Diploma IV STAN. Kembalinya Patuan ke kampus membuat penggemar sosok Soe Hok Gie ini kembali aktif berkegiatan di organisasi Stapala. Hingga dalam suatu obrolan santai dengan rekan-rekannya, tercetuslah ide melakukan ekspedisi tujuh puncak gunung tertinggi di Indonesia.

Dengan bekal pengalaman telah



berikutnya dengan total perjalanan enam puncak selama 32 hari. Puncak gunung tersebut antara lain Bukit Raya di Kalimantan (2.278 mdpl), Binaiya di Maluku (3.027 mdpl), Latimojong di Sulawesi (3.450 mdpl), Rinjani di Kepulauan Nusa Tenggara (3.726 mdpl), dan Semeru di Pulau Jawa (3.676 mdpl).

“Hampir tidak ada istirahat. Kami semua mengejar waktu. Saat-saat melepas lelah hanya bisa di perjalanan,” kenangnya. Kekuatan fisik yang dikhawatirkan ternyata bukanlah penghambat utama. Setiap mendaki, Patuan sebagai ketua tim selalu memeriksa kondisi anggotanya, “Secara fisik mungkin kamu sanggup, mental kamu sanggup *nggak?*” ujarnya. Faktor mental justru melebihi faktor fisik dalam menentukan keberhasilan pendakian.

Mimpi menuju Cartensz Pyramid

Selang lima bulan dari pendakian puncak keenam, Patuan kembali diberikan kesempatan meraih puncak tertinggi di Papua, yaitu Cartensz Pyramid. Jeda waktu ini dikarenakan tim perlu mengurus perizinan dan mengumpulkan dana terlebih dahulu untuk masuk ke kawasan gunung berketinggian 4.884 mdpl ini. “Kami bersyukur mendapat kemudahan akses menuju puncak tertinggi di Papua dari Nabire menuju Lembah Danau-Danau, *basecamp* terakhir menuju tebing Cartensz,” lanjutnya. Dalam kondisi semangat yang naik turun, Stapala akhirnya menugaskan Patuan bersama Meiliana Eka Inayati untuk berangkat ke Papua.

Mengawali perjalanan dari Lembah Danau-Danau (4200 mdpl) di Papua, Patuan seringkali mendapat ujian kesabaran, baik dari kondisi alam maupun rekan seperjalanannya. Dilema batin Patuan mengeruak saat harus memilih menuju puncak Cartensz Pyramid bersama rekannya atau pergi sendirian dengan waktu pendakian yang lebih cepat. Patuan memutuskan membuang jauh ego, ia pun menemani Meiliana dan meraih puncak bersama-sama.

Rencananya, kisah Patuan bersama tim Ekspedisi Saptanusa akan dibukukan. Saat ini ia sedang menyusun naskah untuk proses pembuatan buku tersebut. Perjalanan meraih tujuh puncak tertinggi memberikan banyak pelajaran bagi pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Sidempuan ini. “Negara sudah memberikan banyak hal kepada saya. Sekarang saya harus berkontribusi lebih besar,” ujarnya.

Dalam lubuk hatinya, Patuan bercita-cita menjadi pengajar. “Mengajar adalah salah satu cara saya untuk berkontribusi lebih besar. Saya ingin membagi ilmu, pengalaman, dan tenaga yang saya miliki,” tuturnya penuh keyakinan. Saat ditanya mengenai kutipan favoritnya, Patuan mengungkapkan sebuah kalimat menggugah dari Soe Hok Gie, “Yang paling berharga dan hakiki dalam kehidupan adalah dapat mencintai, dapat iba hati, dapat merasai kedukaan,” ujarnya sembari tersenyum.

Teks Pradany Hayyu

mendaki empat dari tujuh puncak tertinggi, Patuan bersama rekan-rekannya mewujudkan mimpi menyelesaikan sisa puncak lainnya. “Awalnya saya berpikir (ekspedisi ini) tidak akan bisa terwujud. Waktunya terbatas, dananya pun tidak ada,” kata pria berdarah Mandailing Batak ini. Sayangnya, tekad Patuan lebih kuat daripada kondisi yang serba terbatas.

Pada Februari 2015, program Ekspedisi Saptanusa bertajuk “7 Puncak untuk 7 Dekade” dicanangkan. Stapala sudah menetapkan manajer ekspedisi dan melakukan seleksi atlet. Saat itu, Patuan sempat ragu untuk mengikuti seleksi pemilihan atlet. Ia menganggap, kekuatan fisiknya pasti kalah bersaing dengan rekan-rekan lain yang lebih muda. Pada akhirnya, Patuan terpilih menjadi salah satu atlet untuk menjalankan ekspedisi yang akan dicatat dalam Museum Rekor Indonesia (MURI) tersebut.

Petualangan dimulai

Tak terbayang bahwa ekspedisi ini dilakukan untuk mengejar waktu. Tim diharapkan mampu memecahkan rekor Tim Tercepat yang menyelesaikan tujuh puncak gunung tertinggi di Indonesia. Ekspedisi diawali dengan mendaki puncak tertinggi di Sumatera, yaitu gunung Kerinci (3.805 mdpl) di Jambi pada 22 Agustus 2015.

Secara berturut-turut, tim berhasil menyelesaikan puncak



Memperoleh Lebih dengan yang Sedikit

Foto
www.normann-copenhagen.com

Beberapa dari kita mungkin memiliki kebiasaan berbelanja tanpa tujuan: *unintentional shopping*. Salah satu penyebabnya boleh jadi karena kita menjadikan belanja sebagai ajang *mood booster*. Berbelanja menjadi pilihan untuk mengembalikan *mood* yang menurun.

Tepatkah itu?

Yang pasti, berbelanja berdampak pada tiga hal: waktu yang berkurang, tabungan yang menipis, dan barang yang bertambah. Tidak jarang, rumah disesaki aneka barang hasil belanja. Hingga kita menyadari dan bertanya, apa manfaat membelanjakan uang untuk ini?

Courtney Carver, seorang blogger asal Amerika, memulai blog bertajuk *be more with less* sebagai jawaban atas problem hidupnya selama ini. Seperti kebanyakan kita, Carver pernah mengalami kehidupan yang membuatnya kewalahan dan kurang bersemangat. Hidup yang penuh dengan kerja terlalu keras, menghabiskan biaya yang terlalu besar, tetapi membuatnya kurang tidur. Kesehariannya dipenuhi dengan rasa lelah, stress, hingga jatuh sakit.

Pada saat itu, ia merasa perlu mengubah cara hidupnya agar lebih bahagia. Harapannya lebih dari sekadar memiliki gaji yang bisa memenuhi hasrat belanjanya. Pada titik itulah ia menemukan jawaban dari pertanyaannya selama ini: *simplicity* atau kesederhanaan.

Kesederhanaan dalam hidup mengutamakan makna di atas materi. *Be more with less* adalah tentang menyederhanakan

kehidupan dan benar-benar hidup untuk sekarang. Hidup sederhana membuat kita memiliki lebih banyak waktu dan ruang untuk menemukan *what really matters*. Apa yang sebenarnya penting dan bermakna untuk kita.

Bayangkan, ada berapa banyak sumber daya (waktu, tenaga dan uang) yang habis untuk memenuhi lemari dan rumah kita dengan aneka barang yang kita kira bisa memberi nilai lebih pada kehidupan, tapi ternyata tidak berguna. Salah satu cara Carver adalah mulai memindahkan barang yang tidak diperlukan dari dalam rumah. Kemudian fokus hanya pada apa yang terbaik.

Kumpulkan semua baju, pilih yang paling kita sukai, kemudian sumbangkan sisanya. Jangan kaget jika ternyata kita menyimpan baju yang tidak kita ketahui asal atau alasan kita membelinya. Mereka yang mencoba cara ini, berhasil membuang hampir 80 persen isi lemari dan hanya membutuhkan sisanya.

Ternyata, prinsip sederhana berhasil membuat hidup Carver dan mereka yang terinspirasi untuk mencobanya, menjadi lebih bermakna. “Lebih” karena ada lebih banyak uang di tabungan mereka, lebih sedikit hutang, lebih sedikit stres, dan lebih banyak ruang di rumah dengan lebih sedikitnya barang.

Hal yang tak kalah penting, dengan prinsip *less is more*, kita akan lebih terjaga dari *unintentional shopping*. Dengan demikian, kita lebih mampu mengefisienkan waktu, bahkan lebih berbahagia dengan berbagi. Kini, apa yang terlihat lebih sedikit (*less*), ternyata tidak selalu lebih buruk bukan? Bahkan ternyata kita bisa memperoleh lebih banyak (*more*) dari yang sedikit.

Teks Athiah Listyowati

Menikmati Aksi Superhero dan Mutan dalam X-Men: Apocalypse

Hal terpenting yang harus saya utarakan sebelum memulai ulasan kali ini adalah Anda setidaknya perlu sudah menonton “X-Men: First Class” (2011) dan “X-Men: Days of Future Past” (2014) untuk memahami betul jalan cerita “X-Men: Apocalypse”.

Tanpa keduanya, Anda akan sedikit kesulitan memahami pengembangan karakter-karakter dalam “Apocalypse”, dan selebihnya ia hanya akan berisi ledakan-ledakan dan adegan perkelahian penuh grafis komputer. Walaupun tidak sebagus pendahulunya yakni “Days of Future Past”, saya rasa “Apocalypse” masih mampu menyuguhkan aksi memukau yang sayang untuk Anda lewatkan.

Dalam “Apocalypse”, tersebutlah seseorang bernama En Sabah Nur, alias Apocalypse (diperankan oleh Oscar Isaac), yang dipuja sebagai dewa oleh masyarakat Mesir. Selama ribuan tahun ia terkurung di bawah reruntuhan piramida, hingga suatu hari ia bangkit dan ingin kembali menguasai dunia. Untuk itu, ia menciptakan empat pasukan penunggang kuda, yang ia sebut the Four Horsemen, yakni Storm (diperankan oleh Alexandra Shipp), Angel (diperankan oleh Ben Hardy), Psylocke (diperankan oleh Olivia Munn), dan yang terakhir, Magneto (diperankan oleh Michael Fassbender).

Saat itu, Magneto masih berada dalam pengasingannya di Polandia, di mana ia memiliki seorang istri dan anak. Begitupun dengan Mystique (diperankan oleh Jennifer Lawrence) yang tengah berada di Jerman. Di saat Magneto dipengaruhi untuk bergabung bersama Apocalypse, Mystique, Profesor Charles Xavier (diperankan oleh James McAvoy), dan mutan-mutan lain di Xavier School for Gifted Youngsters pun bergabung untuk menghancurkan kekuasaan Apocalypse.



Jualan utama “Apocalypse” adalah visualisasi pertarungan yang begitu bombastis, khususnya menjelang akhir film. Beberapa adegan mungkin menampilkan grafis komputer yang kurang nyata, tetapi sebenarnya di sanalah kita akan diajak menikmati keseruan para mutan bertarung menggunakan kekuatan masing-masing. Cerita yang disajikan juga tergolong ringan dan tidak mengandung banyak filosofi atau pesan moral yang rumit, kecuali bahwa beberapa pengembangan karakter cukup terkait dengan film-film X-Men sebelumnya. Satu hal yang cukup mengganggu adalah peran Magneto dalam film ini. Karakterisasinya terlihat kurang humanis, landasannya dalam bertindak sangatlah klise dan agak sulit begitu saja diterima pikiran logis kita.

Terlepas dari beberapa kekurangan, tentu saja “X-Men: Apocalypse” patut Anda tonton ramai-ramai di akhir pekan. Beberapa hal baru tentang kaitan para mutan di seri X-Men akan disajikan di film ini (khususnya di adegan pascakredit-penutup), jadi untuk melengkapi pengetahuan Anda tentang semesta karakter X-Men, sebaiknya Anda tidak melewatkan film ini.

Peresensi Akbar Saputra



Bakso Boedjangan, Boekan Coema Boeat Jang Jomblo!

Salah satu yang patut diacungi jempol dari Kota Bandung adalah kreativitas anak mudanya. Banyak ide baru yang menjadi trendsetter dan sukses menarik minat banyak orang. Salah satunya ditunjukkan oleh seorang mojang bernama Dian Malinda. Bersama rekan-rekannya, ia berhasil membesut kesuksesan lewat menu olahan bakso yang bernama Bakso Boedjangan. Nama kedai baksonya yang unik mungkin mendukung mewabahnya cabang kedai bakso ini di penjuru Kota Bandung, serta cabang-cabang lainnya di luar kota seperti Kelapa Gading, Jakarta dan Garut. Menu bakso sebenarnya adalah menu kuliner umum di Kota Bandung. Banyak sekali warung bakso yang sudah lebih dulu terkenal enak dan menggoyang lidah. Namun demikian, usaha Dian Malinda untuk mem-branding 'Bakso Boedjangan' disertai promosi giat di media sosial cukup berhasil mencuri perhatian. Pada Januari tahun lalu, saat warung Bakso Boedjangan pertama kali dibuka di Jalan Dipati Ukur, 1.000 mangkuk bakso laris manis tak bersisa dalam waktu lima jam.

Menu favorit dari kedai bakso ini

adalah bakso super yang terdiri atas beberapa varian seperti Bakso Super Keju, Bakso Super Pedas dan Bakso Super Urat. Jika memesan Bakso Super Pedas, kita harus bersiap merasakan "ranjau" rawit yang mengejutkan lidah. Pesanan favorit lainnya adalah Bakso Super Keju yang di dalamnya terdapat keju yang langsung meleleh ketika sampai di lidah. Harga satu mangkuk bakso super itu hanya sekitar dua puluh ribuan saja.

Untuk yang merasa kurang kenyang dengan semangkuk bakso, jangan khawatir. Warung Bakso Boedjangan juga menyediakan menu nasi bakso dengan pilihan bumbu merica hitam dan saus teriyaki. Ada pula pilihan tambahan topping seperti bakso goreng, ceker, tetelan, dan pangsit rebus. Lucunya, khusus pengunjung yang lagi bokek tersedia menu murah meriah bernama bakso kosong. Isinya lima butir bakso ditambah mie bihun dan sayur dengan harga cukup dua belas ribu rupiah saja.

Pengunjung juga wajib mencoba menu andalan lainnya yaitu es durian kesepian. Namun tak sepi seperti namanya, es durian ini terdiri dari tiga scoop durian asli tanpa biji yang ditambah dengan saus vanilla. Rasa durian yang

manis dan lembut dengan sensasi dingin, enak sekali di lidah setelah menjajal rasa gurih dan pedas kuah bakso.

Hal lain yang menarik dari restoran ini adalah desain interiornya. Saat saya mengamati sekitar, sangat terlihat bahwa pemiliknya ingin menampilkan kesan jadul kepada para pengunjung. Berbagai macam pajangan dekorasi tempo dulu dipajang di tembok. Ada radio antik, kaleng kerupuk mini, cerek dan gelas kaleng, serta foto-foto klasik tempo dulu. Mungkin konsep jadul memang sengaja digunakan sehingga kata 'boedjangan' pun sengaja menggunakan ejaan lama.

Pada salah satu tembok di sudut ruangan terdapat tulisan doa para boedjangan yang bunyinya cukup 'memaksa' supaya Tuhan mengirimkan jodoh untuknya. Beberapa mata yang mengarahkan pandangan ke tembok itu pun ikut-ikutan membaca. Bagi yang sudah memiliki pasangan, mungkin hanya akan tersenyum saat membacanya. Namun bagi yang jomblo, boleh jadi ia akan berteriak *aamiin* sekenyang-kencangnya dalam hati. Ya, siapa tau, setelah kenyang makan Bakso Boedjangan dan mengaminkan doa itu, ia kemudian dipertemukan langsung dengan jodohnya.

Teks Resirasari Diah,
Pegawai Sekretariat Jenderal

Lebih Dinamis dan Progresif

LPDP (Indonesia Endowment Fund for Education) brings opportunity for the 'hidden gems' to shine.



Foto Dok. Pribadi

Bergerak dalam dunia jurnalistik dengan jam kerja tinggi tidak hanya dituntut memiliki wawasan yang luas tetapi juga tingkat pendidikan tinggi. Mungkin inilah salah satu alasan Kartika Octaviana, *news anchor* sekaligus produser salah satu program acara Metro TV, memutuskan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

Berbekal informasi dari salah seorang rekan sesama presenter, Vina, panggilan akrabnya, mengikuti seleksi beasiswa pascasarjana dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Wanita yang sempat bekerja sebagai reporter di Kompas TV ini pun langsung mendaftar pada periode kedua tahun 2015.

Tak kurang dari enam bulan dihabiskan Vina untuk mempersiapkan diri menghadapi persaingan yang sangat kompetitif. Saat proses penulisan *essay*, Vina mengakui bahwa pertanyaan yang diberikan memicunya kembali merefleksikan apa yang sebenarnya menjadi tujuan karir dan panggilan hidupnya. "Proses seleksi ini memungkinkan saya untuk *pause* dan *redefine my goals*," ujar wanita yang kini telah diterima di Universitas Columbia, New York, Amerika Serikat.

Ketika dinyatakan sebagai *awardee* LPDP, Wanita yang pernah menjadi *awardee fellowship* program Voice of America ini merasa senang sekaligus lega. "Beasiswa LPDP merupakan satu-satunya pilihan saya pada saat itu. Saya sudah mengantongi LoA (*Letter of Agreement*). Jika tidak mendapatkan beasiswa, rencana studi saya kemungkinan mundur atau gagal," kata Vina.

Ke depan, setelah menyelesaikan Master of Public Administration, Vina berjanji akan mengabdikan pengetahuan dan *hand on skills* yang dimilikinya. "Saya ingin membantu mereduksi subjektivitas dari formulasi kebijakan. Saya bisa kembali menempuh karier di media televisi dan menjadi *watchdog*, bekerja di institusi pemerintah, maupun lembaga swadaya masyarakat."

Dalam bidang pendidikan, Vina memandang pendidikan Indonesia telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan dengan dimulainya integrasi teknologi informasi pada metode pengajaran. Meskipun demikian, Vina melihat dunia pendidikan global memiliki standar yang tinggi, misalnya seperti tingkat partisipasi mahasiswa dan standar penulisan yang rigid untuk menghindari plagiasi.

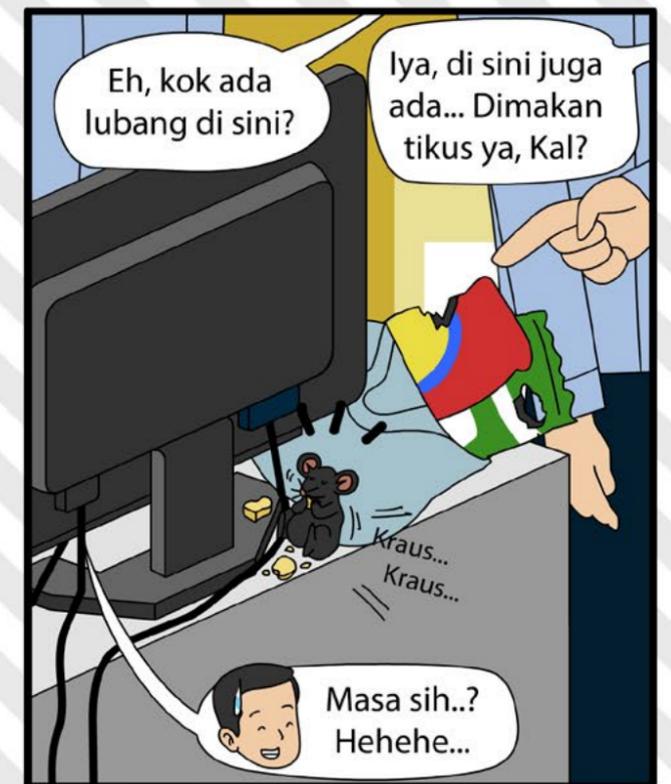
Oleh karena itu, Vina berharap dunia pendidikan Indonesia bisa lebih dinamis dan progresif. "Salah satu cara yang paling efektif ialah memperkuat jaringan para pelajar yang menempuh pendidikan di luar negeri. Lalu, mentransfer ilmu yang mereka peroleh untuk memperkuat sistem pendidikan Indonesia," ungkapnya.

Teks lin Kurniati



Bung Piskal

CERITA: ARFINDO GAMBAR: BIMD



A high-angle, close-up photograph of a group of approximately ten young children of various ethnicities. They are all smiling and looking towards the camera. Some are making peace signs with their hands. The children are dressed in casual clothing, including a green headband, a blue shirt, and a white shirt. The background is a plain, light-colored wall.

MEMPERINGATI
HARI PERLINDUNGAN
ANAK SEDUNIA

photo: Eko P. W



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA